BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Filosofis dan Profil Pendidikan Agama Islam

1. Sekilas tentang Filsafat Pendidikan Islam sebagai Landasan bagi Pendidikan Agama Islam

Di antara pendapat-pendapat tentang Filsafat Pendidikan Islam, dapat dipaparkan dua pendapat Abudin Nata dan M. Arifin. Manurut Nata, Filsafat Pendidikan Islam dapat dikatakan suatu upaya menggunakan metode filosofis, yakni berpikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal tentang masalah-masalah pendidikan seperti masalah manusia (peserta didik dan guru), kurikulum, metode, dan lingkungan yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis sebagai acuan primernya. Selanjutnya Arifin menjelaskan bahwa Filsafat Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam, serta landasan bahwa manusia harus dibina menjadi hamba Allah yang berkepribadian demikian.² Dari dua pendapat ini dapat dipahami bahwa Filsafat Pendidikan Islam merupakan konsep berpikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal tentang masalahmasalah pendidikan yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis, untuk

¹ Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 15.

² M.Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), xi.

membentuk manusia yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam.

Dengan substansi di atas, Filsafat Pendidikan Islam memiliki kedudukan yang penting, yaitu menyumbangkan analisisnya kepada ilmu pendidikan Islam tentang hakikat masalah yang nyata dan rasional yang mengandung nilai-nilai dasar yang dijadikan landasan dan petunjuk dalam proses pendidikan.³ Lebih jauh, dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti abad ke-21 ini, kegunaan fungsional dari Filsafat Pendidikan Islam adalah semakin penting, karena filsafat menjadi landasan strategi dan kompas jalannya pendidikan Islam. Kemungkinankemungkinan yang menyimpang dari tujuan pendidikan Islam akan dapat diperkecil dan sebaliknya kemampuan dan kedayagunaan pendidikan Islam dapat lebih dimantapkan dan diperbesar karena gangguan, hambatan, dan rintangan yang bersifat mental-spiritual serta teknis operasional akan dapat diatasi secara lebih mudah.4

Kaitannya dengan kedudukan tersebut, dalam relevansinya dengan penelitian tentang kurikulum ini, penulis memandang penting untuk menyajikan pendapat filosofis Majid 'Irsān al-Kilani tentang relasi peserta didik dengan *al-Khāliq*, alam semesta, orang lain, kehidupan duniawi, dan kehidupan akhirat. Penjelasan singkat tentang hal ini adalah sebagai berikut.

a. Relasi peserta didik dengan *al-Khaliq* dan, yaitu terciptanya relasi ibadah atau relasi penghambaan (*'alāqah 'ubūdiyyah*), yang di antaranya meliputi makna ibadah, bentuk-bentuk ibadah; orientasi agama, orientasi

.

³ Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 44.

⁴ Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, xii.

masyarakat, orientasi kebutuhan, saling menyempurnakan antara semua orientasi ibadah tersebut, hubungan antara ibadah dan ilmu, keutamaan ibadah dan urgensinya, dan uraian tentang pengaruh pemahaman tentang ibadah dalam pendidikan era modern.

- b. Relasi peserta didik dengan alam semesta, yaitu terciptanya relasi eksplorasi ('alāqah taskhīr'), yang di antaranya meliputi pengertian eksplorasi, tujuan eksplorasi, ruang lingkup eksplorasi.
- c. Relasi peserta didik dengan orang lain, yaitu terciptanya relasi keadilan dan kebaikan (*'alāqah 'adl wa iḥsān*), yang di antaranya meliputi pengertian adil dan *iḥsān*, hubungan pendidikan dengan adil dan *iḥsān*.
- d. Relasi peserta didik dengan kehidupan duniawi, yaitu terjalinnya relasi ujian ('alāqah ibtilā'), yang di antaranya meliputi pengertian ujian dan bentuk ujian.
- e. Relasi peserta didik dengan kehidupan akhirat, yaitu terjalinnya relasi tanggung jawab dan pemberian balasan (*'alāqah mas'ūlīyah wa jazā'*), yang di antaranya meliputi pengertian tanggung jawab, urgensi tanggung jawab dan hubungannya dengan ibadah, tingkatan tanggung jawab, serta tanggung jawab akhirat dan masyarakat.⁵

Pandangan filosofis al-Kīlanī tersebut berkaitan dengan tiga hal substantif, yaitu visi dan misi, tujuan, dan asas pendidikan Islam. Penjelasan tentang hal ini sebagai berikut.

⁵ Majid Irsān al-Kīlānī, *Ahdāf al-Tarbiyah al-Islāmiyah fī Tarbiyah al-Fard wa Ikhrāj al-Ummah wa Tanmiyah al-Ukhūwah al-Insāniyah* (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1998), 25-26.

a. Substansi Visi dan Misi Pendidikan Islam

Lima relasi tersebut secara umum memiliki substansi tentang visi dan misi pendidikan Islam. Visi-misi pendidikan Islam dalam perspektif al-Kīlanī adalah mengantarkan peserta didik mencapai kemajuan insaninya, yaitu sampai ke derajat "bentuk yang sebaik-baiknya" seperti yang diistilahkan al-Qur'an (bulūgh al-muta 'allim darajat al-raqī al-insānī aw darajat aḥṣān taqwīm hasba al-ta 'bīr al-Qur'ānī). Dengan kata lain berdasarkan kelima substansi di atas yaitu terciptanya relasi harmonis antara peserta didik dan Allah (al-Khāliq), antara peserta didik dan alam semesta (kawn), antara peserta didik dan orang lain (insān), antara peserta didik dan kehidupan dunia (ḥayāt) dan antara peserta didik dan kehidupan akhirat (ākhirat).

Dari lima relasi di atas, relasi ibadah merupakan relasi yang paling utama dan fundamental, bahkan menjadi landasan bagi relasi-relasi lainnya. Dalam Filsafat Pendidikan Islam, konsep ibadah mencakup tri tunggal dimensi: (1) dimensi "agamawi" (al-mazhar al-dīnī), yaitu terjalinnya relasi seorang Muslim dengan Penciptanya, Allah; (2) dimensi "sosial-kemasyarakatan" (al-mazhar al-ijtimā'ī), yaitu terjalinnya relasi seorang Muslim dengan individu lain atau berbagai komunal masyarakat; dan (3) dimensi "kealaman" (al-mazhar al-kaunī), yaitu terjalinnya relasi seorang Muslim dengan alam sekitarnya.

Lima relasi tersebut di atas dapat terjalin harmonis bila empat komponen penunjangnya dapat terealisasi, yaitu:

- 1) Komponen akidah ('āmil 'aqādī), yaitu dengan menentukan relasi antara Allah sebagai Zat yang Maha mendidik (al-Murabbī) dan objek pendidikan, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya;
- 2) Komponen sosial ('āmil ijtimā'ī), yaitu teraktualisasinya relasi antar manusia, bahkan di antara seluruh individu yang menjadi peserta didik (muta'allim);
- 3) Komponen *setting* tempat (*'āmil makānī*), yaitu metode yang digunakan peserta didik untuk mengelola sarana kehidupan demi mencapai kemajuan umat manusia di dunia; dan
- 4) Komponen latar waktu ('āmil zamānī), yaitu memperhatikan aspek waktu yang sedang dialami sejak peserta didik lahir di dunia hingga kelak memasuki kehidupan akhirat.

b. Substansi Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan Islam secara umum menurut al-Kilani adalah:

(1) "melahirkan" individu yang baik (*al-fard al-ṣālih*); (2) "mencetak" keluarga Islami (*al-usrah al-muslimah*); (3) "mengeluarkan" umat pengemban risalah kenabian (*ummah al-risālah*); dan (4) "menciptakan" persaudaraan insani (*al-ukhūwah al-insānīyah*). Sedangkan tujuan khususnya adalah melahirkan insan paripurna dan berdedikasi (*al-insān al-kāmil al-rāqī*), yang mampu merealisasikan visi-misi pendidikan Islam, yaitu terjalinnya relasi antara peserta didik dan Allah, antara peserta didik dan alam semesta, antara peserta didik dan orang lain, dan

relasi peserta didik dengan kehidupan dunia dan akhirat.⁶

c. Substansi Asas Pendidikan Islam

Dalam pandangan dan perspektif al-Kilani, dasar pendidikan adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga yang menjadi objek pendidikan Islam adalah manusia yang telah tergambar dan terangkum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini berbeda dengan manusia dalam pendidikan sekuler yang penggambarannya diserahkan pada mayoritas pendapat atau pada orang-orang tertentu dalam masyarakat, atau pada seorang individu karena kekuasaannya, yang berarti diserahkan kepada angan-angan seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan asas pendidikan yang menjadi titik tolak dari gagasan dan langkah al-Kailani adalah pengamatannya terhadap penyebab utama kemunduran umat Islam, yaitu karena krisis pendidikan. Hal ini berawal dari kemunduran psikologis dan intelektual umat yang bermuara dari kelemahan filsafat pendidikan Islam, khususnya karena kebimbangan dari visi-misi pendidikannya (al-ahdāf al-tarbawīyah) yang meliputi: (1) ketidakjelasan batasan visi-misi umum pendidikan; (2) ketidakjelasan visi-misi pendidikan bagi pribadi atau individual; (3) adanya kontradiktif antara visi-misi pendidikan bagi pribadi dengan visi misi sosial masyarakat dan ekonomis; dan (4) terjadinya kontradiksi antara visi-misi pendidikan bagi pribadi dengan visi-misi yang berkaitan dengan keluhuran akhlak (*al-fadā'il al-akhlāqīyah*).

⁶ Ibid., 26

⁷ Ibid.

Pandangan para tokoh tentang Filsafat Pendidikan islam di atas, dalam konteks penelitian ini, bersubstansi tentang asas, sumber dan landasan, nilainilai dasar, visi-misi, dan tujuan pendidikan agama Islam. Semuanya ini merupakan landasan bagi konstruksi dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam.

2. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Terdapat beberapa definisi pendidikan Agama Islam menurut para ahli. Menurut Zakiyah Daradjat, Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan kepada siswa agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam yang telah diyakininya setelah menyeluruh serta menjadikannya sebagai pandangan hidup demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Pada bagian lain Daradjat mendefinisikan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh serta pada akhirnya dapat menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.

Menurut Zuhairini, Pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk membimbing ke arah pertumbuhan kepribadian siswa secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam sehingga terjalin kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁰

⁹ Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 87.

¹⁰ Zuhairini dkk., Metodologi Penelitian Agama Islam (Solo: Ramadani, 1999), 10.

⁸ Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 86.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.¹¹

Berkaitan dengan hal itu juga secara spesifik, dalam kurikulum 2004 dijelaskan bahwa: Pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan pada pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan seharihari, menjalankan pola hidup bersih dan sehat, berpikir secara logis, kritis kreatif inovatif, menjalankan hak dan kewajiban, berkarya dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab dan menjadikan ajaran agama sebagai landasan memecahkan masalah serta perilaku dalam kehidupan masyarakat.¹²

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan serta penggunaan pengalaman yang dilakukan secara terencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan menurut Muhaimain, bahwa "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan Islam dari siswa, di samping itu membentuk kesalehan sosial. Dalam arti kualitas atau kesalehan pribadi itu diharapkan mampu memancar keluar dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya (bermasyarakat), baik yang seagama maupun yang tidak seagama, serta dalam berbangsa dan bernegara, sehingga terwujud

.

¹¹ Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), 57.

¹² Departemen Agama RI. Dirjen Kelembagaan Islam, *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum* 2004, RA. MI. MTs dan MA (Jakarta: Depag, 2004), 22.

persatuan dan kesatuan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan antar sesama manusia.¹³

Sebagai pengembangan wawasan selanjutnya, Arifin menjelaskan ciriciri pendidikan agama Islam di antaranya sebagai berikut: (1) tujuan utamanya adalah pembinaan anak didik untuk bertauhid (2) kurikulum disesuaikan dengan fitrah manusia (3) kurikulum yang disajikan merupakan hasil pengujian materi dengan landasan al-Qur'an dan al-Sunnah (4) mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan akliah anak didik serta keterampilan yang akan diterapkan dalam kehidupan konkret (5) pembinaan akhlak anak didik (6) kurikulum pendidikan Islam senantiasa relevan dengan perkembangan zaman.¹⁴

Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 pasal 1 dan 2 ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap

¹³ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan PAI di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 76. Lihat juga Sa id Ismā il 'Alī, *Uṣūl al-Tarbīyah al-Islāmīyah* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1993), 81.

¹⁴ HM, Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 528.

terhadap tuntutan perubahan zaman¹⁵.

Dari pengertian di atas, dalam rangka mengembangkan dan membangun potensi manusia Indonesia seutuhnya, dalam arti utuh jasmani dan rohani sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Rebuplik Indonesia tahun 1945, diperlukan adanya pelaksanaan pendidikan agama pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan agama yaitu usahausaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar
supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran agama. ¹⁶ Pendidikan agama
menyangkut manusia seutuhnya, ia tidak hanya membekali anak dengan
pengetahuan agama, atau mengembangkan intelektual anak saja dan tidak
pula mengisi dan menyuburkan perasaan (*sentiment*) agama saja, akan tetapi
ia menyangkut keseluruhan diri pribadi anak, mulai dari latihan-latihan
amaliah sehari-hari, yang sesuai dengan ajaran agama, baik yang
menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia
lain, manusia dengan alam, serta manusia dengan dirinya sendiri. ¹⁷

3. Perbandingan antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam

Ada dua istilah yang perlu diperjelas sebelum pembehasan dilanjutkan lebih mendalam. Pada bagian ini akan dipaparkan konsep pendidikan Islam dan pendidikan Agama Islam yang seacara terminologis dan operasional berbeda. Dua istilah itu memiliki makna yang berbeda meski secara esensial

¹⁷ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003), 124.

-

¹⁵ Undang-undang RI No. 20 Tahu 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Unbara, 2003), 3.

¹⁶ Zuhairini, dkk, Metodik Khusus Kependidikan Agama (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 27.

terdapat kesamaan di antara keduanya.

Istilah pendidikan Islam diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi anak melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. ¹⁸ Pendidikan Islam menekankan pada orientasi moral dan spiritual dalam proses pembelajaran. Arah pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses pembimbingan, pembelajaran dan atau pelatihan terhadap anak, generasi muda, manusia agar nantinya mampu hidup dan melaksanakan peranan serta tugas-tugas hidupnya dengan baik.

Pendidikan Islam secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembimbingan, pembelajaran atau pelatihan terhadap manusia (anak, generasi muda) agar nantinya menjadi orang Islam, yang berkehidupan serta mampu melaksanakan peranan dan tugas-tugas hidup sebagai seorang muslim yang *kaffah*. Jadi pendidikan Islam, dengan singkat dapat dikatakan sebagai proses pembimbingan, pembelajaran atau pelatihan agar anak manusia (anak, generasi muda) menjadi orang muslim atau orang Islam.

Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya. ¹⁹ Dari niat yang tulus serta *mujahadah* semata mencari ridha Allah inilah pendidikan Islam lepas dari interesinteres pribadi. Motivasi *ilahīyah* dalam pendidikan Islam inilah yang, menurut Basori, kemudian memberi makna berbeda antara pendidikan Islam

¹⁹ Muhaimin, Nuansa Baru..., 7.

_

¹⁸ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 22.

dan pendidikan umum, dalam tataran praksis pendidikan. Pendidikan Islam lebih berorientasi menjadikan manusia yang berbudaya berdasarkan ajaran-ajaran dan pandangan Islam.²⁰

Secara lebih detail, M. Arifin mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan mengangkat derajat kemanusiaannya, sesuai dengan kemampuan dasar (*fitrah*) dan kemampuan ajarannya, dalam hal ini al-Qur'an dan Hadis.²¹ Potensi dasar manusia (*fitrah*) merupakan jatidiri manusia inilah yang akan dibimbing dalam pendidikan Islam, agar konsisten dalam memegangi ajaran Islam.

Peneliti juga sependapat dengan pemikiran Ahamad Tafsir yang menyatakan bahwa pendidikan Islam memiliki makna berbeda dengan pendidikan lain. Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seorang kepada seseorang agar berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Perkembangan individu tidak hanya meliputi jasmaniyah tetapi juga akal dan hati (ruhaniyah).²²

Konsep Ahmad Tafsir tersebut senada dengan definisi yang dikemukakan oleh M. Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya yang meliputi akal, hati, jasmani, rohani, akhlak serta keterampilan. ²³ Artinya, konsep pendidikan Islam tidak terbatas pada aspek material tetapi menyentuh aspek

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 32.

²⁰ Kamrani Basori, Ontologi Pendidikan Islam dan Dakwah (Yogyakarta: UII Press, 2003), 113.

²¹ M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 14.

²³ M. Yusuf al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al Banna*, ter. Bustami A Gani dan Zaini Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 157.

non materi yang merupakan komponen non-empirik dalam diri manusia yang perlu dikembangkan, agar menjadi manusia seutuhnya.

Berbeda dengan pendapat Azyumardi Azra yang menyatakan bahwa, manusia memiliki organ-organ kognitif seperti hati, akal, pandangan rohani, pengalaman serta kesadaran yang potensial untuk dikembangkan melalui pendidikan. Dengan potensi ini manusia dapat menyempurnakan kemanusiannya sehingga menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan.²⁴

Konsep dasar pendidikan Islam adalah konsep atau gambaran umum tentang pendidikan, yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. sumber ajaran Islam, al-Qur'an memang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan permasalahan hidup dan perikehidupan umat manusia di dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Naḥl [16]: 89:

Dan ingatlah akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. ²⁵

Menurut ajaran Islam segala gejala dan proses yang berlangsung secara alami sebenarnya berlangsung menurut *sunnatullah*, yang pengertian

-

²⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 7.

²⁵ Al-Qur'an surat al-Nahl [16]: 89. Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, 277.

dasarnya adalah "kebiasaan atau hukum ciptaan Allah. Dengan kata lain, sunnatullah adalah kebiasaan atau hukum yang diciptakan oleh Allah yang berlaku dalam proses penciptaan alam. Sementara orang biasa menyebutnya dengan "hukum alam". Gejala dan proses pendidikan sebenarnya berlangsung menurut hukum-hukum atau kebiasaan-kebiasaan yang telah diciptakan oleh Allah dalam proses penciptaan manusia, dan merupakan bagian atau mata rantai yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sunnatullah yang berlaku dalam proses penciptaan alam semesta ini. Oleh karena itu untuk memahami hakikat dan prinsip-prinsip dasar kependidikan menurut ajaran Islam perlu dianalisis menggunakan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan proses penciptaan alam semesta dan hubungannya dengan manusia sebagai bagian atau unsur utamanya.

Dari konsep dasar pendidikan Islam (al-Qur'an dan al-Sunnah), pendidikan Islam tidak hanya sekedar ceramah melainkan dari apa yang disampaikan atau yang diucapkan guru kepada para siswa harus berdasarkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih sesuai dengan apa yang dibahas. Dalam pemahaman ini pendidikan Islam dimaknai secara totalitas dan bersifat makro. Sementara itu, konsep pendidikan Islam dalam makna mikro dipahami dalam bentuk mata pelajaran dan pengajaran agama di sekolah.

Konsep dasar pendidikan Islam bersumber dari landasan teologis dan filosofis yang berorientasi pada dimensi filsafat pendidikan Islam mencakup isi, aksi, dan perilaku. Sementara itu, pemahaman teologis berorientasi pada persoalan nilai-nilai ketuhanan dan keimanan. Fondasi pemikiran pendidikan

Islam berasal dari konsep teologis Islami yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama.²⁶

Pemahaman inilah yang menjadi pembeda antara konsep pendidikan Islam dengan konsep pendidikan barat. Secara filosofis, pendidikan Islam bertolak dari landasan Islam (wahyu) yang berwawasan teoantroprosentris. Sedang pendidikan barat bertolak dari filsafat Yunani yang antroprosentrissekular yang terlepas dari dimensi moral dan spiritual.²⁷

Secara konseptual pendidikan Islam sangat berbeda dengan konsep pendidikan barat, baik dari sisi ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Namun pendidikan Islam tidak berarti tidak dapat diintegrasikan dengan pendidikan umum. Keduanya kini telah diintegrasikan dalam sistem pendidikan di setiap sekolah, sehingga batasan proses pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan barat telah menyatu dalam sistem yang mutual dan saling melengkapi.

Dalam konteks pendidikan Islam kedekatan manusia dengan Allah SWT, dapat diwujudkan melalui bimbingan, bukan sekedar pengajaran. Hal ini dapat dilihat dari berbagai konsep pendidikan Islam yang diajukan para pakar yang lebih mengarah pada pemberian bimbingan, bukan semata pengajaran yang lebih berorientasi praksis transfer ilmu.

Hasil konferensi Internasional Pendidikan Islam sedunia pertama di Jeddah tahun 1977 disusun rekomendasi bahwa pendidikan Islam dikonotasikan dengan esensi makna *ta'līm*, *ta'dīb*, dan *tarbīyah*. Setiap kata

-

²⁶ Tobroni, *Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualitas* (Malang: UMM Press, 2000), 19.

²⁷ M. Zainuddin, *Paradigma Pendidikan Terpadu* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 34.

ini memiliki makna harfiyah berbeda, namun memiliki esensi makna sama dalam perspektif pendidikan Islam, yaitu bimbingan untuk menuju kepada ajaran *Ilāhīyah*.²⁸

Bimbingan manusia dewasa kepada generasi muda melalui pendidikan Islam ini diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah, agar selalu menyembahnya. Hal ini sesuai dengan tujuan awal manusia diciptakan dan dapat dilihat dalam surat ad-Dhariyat ayat 56;

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.²⁹

Di sisi lain Mujammil Qomar menegaskan, pendidikan Islam harus diproyeksikan untuk selalu mengemban nilai-nilai intelektual, nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai profesional, sebagai idealisme pendidikan Islam. Dengan demikian pendidikan Islam memiliki konsekuensi merefleksikan pesan-pesan wahyu, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah yang disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan Islam perlu dielaborasi dengan perkembangan sosial dengan tetap mempertegas nilai Islami.

Pengertian pendidikan Islam di atas menunjukkan totalitas pengertian yang inheren dengan sistem nilai Islam. Pendidikan Islam juga merupakan

²⁹ al-Qur'an, 51 (Adz-Dzariyat): 56. Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,523.

_

²⁸ A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 23.

komprehensif kegiatan mendidik yang bersumber dari totalitas ajaran Islam, baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.

Merujuk berbagai definisi di atas, dapat diambil pemahaman, pendidikan Islam adalah usaha untuk membimbing manusia melalui internalisasi nilai dan ajaran Islam untuk dijadikan pedoman dalam hidup agar menjadi manusia seutuhnya dan menjadikan al-Qur'an dan hadith sebagai rujukan nilai. Ketika al-Qur'an telah diposisikan sebagai rujukan nilai dan inspirasi setiap kegiatan, pendidikan akan menempati posisi strategis melampaui pendidikan lainnya yang tidak bersumber pada kitab suci. 30

Konsep ini mempertegas bahwa pendidikan Islam memiliki makna lebih luas dalam konsep pendidikan. Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang melibatkan komponen-komponen, baik hardware maupun software, untuk membentuk manusia agar sesuai fitrah dan ajaran Islam. Pemahaman ini sekaligus menjadi arah dan tujuan pendidikan Islam, ketika ditinjau dari perspektif ilmu pendidikan, yaitu menjadikan muslim yang sebenar-benarnya dan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam secara komprehensif. Hasil pendidikan Islam diharapkan dapat membangun *core of value* (inti nilai) dan *core of belief* (inti keyakinan) pada setiap individu yang kemudian diejawantahkan ke dalam setiap aktivitas hidup.

Pembahasan tentang pendidikan Islam di atas mengantarkan ke dalam pembahasan yang lebih fokus, yaitu pendidikan agama Islam. Peneliti sengaja memilah antara pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam

-

³⁰ Imam Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah* (Yogyakarta: Hikayat, 2007), 4.

sebagai tema yang terpisah, agar terbangun pemahaman yang utuh pada setiap fokus bahasan.

Pendidikan Agama Islam adalah nama kegiatan atau usaha-usaha dalam pendidikan agama Islam. 31 Secara formal, pendidikan agama Islam dipahami sebagai mata pelajaran yang diberikan kepada siswa disetiap satuan pendidikan. Dalam struktur kurikulum di sekolah, mata pelajaran pendidikan agama Islam memiliki posisi setara dengan mata pelajaran yang lain, seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, serta mata pelajaran lain.

Pengertian tersebut memperjelas batasan konsep antara pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen (the collect of things), yang meliputi seluruh proses untuk membentuk manusia Islami, sesuai fitrah manusia. Sedangkan pendidikan agama Islam merupakan bagian dari proses pembentukan seorang muslim yang sebenar-benarnya melalui pengajaran materi agama Islam, dalam konteks ini adalah pembelajaran di sekolah.

Di sisi lain, pemahaman pendidikan Islam dalam arti mata pelajaran dikritik oleh Tobroni³² yang mengatakan bahwa pendidikan agama Islam yang menjadi core curriculum berarti mempersempit dan mereduksi arti pendidikan Islam. Pemahaman-pemahaman seperti inilah yang seringkali mengandung keragaman arti pendidikan Islam.

³¹ Muhaimin, Nuansa Baru..., 4. ³²Tobroni, *Pendidikan Islam...*, 13.

Sementara itu, Nurhayati Djamas, memahami bahwa pendidikan agama Islam di sekolah merupakan salah satu bentuk pendidikan Islam.³³ Pemahaman ini senada dengan konsep Muhaimin yang menyatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan bagian pendidikan Islam.

Merujuk pada beberapa pendapat di atas, penulis memahami bahwa pendidikan agama Islam adalah kegiatan dan usaha untuk mengajarkan materi agama Islam melalui proses pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam. Batasan antara pendidikan Islam dan Pendidikan agama Islam juga cukup jelas, ditinjau dari filosofis dan makna pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan upaya dan pemberian bimbingan kepada anak agar menjadi manusia muslim sejati sesuai fitrahnya.

Pada tataran praktis, keberadaan pendidikan agama Islam di madrasah³⁴ merupakan bentuk implementasi kebijakan pendidikan yang secara legal formal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian telah dilengkapi dengan turunan peraturan tentang pelaksanaan PAI di madradah. Dalam sistem kurikulum nasional, PAI merupakan salah satu dari tiga mata pelajaran yang harus dimasukkan dalam setiap lembaga pndidikan formal di Indonesia.³⁵

_

³³ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 136.

³⁴ Lihat Ḥasan 'Abd al-'Al, *Al-Tarbīyah al-Islāmīyah fi al-Qarn al-Rābi' al-Hijrīy* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978), 181-219, tentang tujuh lembaga pendidikan pada masa Abbasiyah. Ketujuh lembaga ini adalah (1) lembaga pendidikan dasar (*al-kuttāb*), (2) lembaga pendidikan masjid (*al-masjid*), (3) kedai pedagang kitab (*al-hawānit al-waraqīn*), (4) tempat tinggal para sarjana (*manāzil al-'ulamā'*), (5) sanggar seni dan sastra (*al-shalūnāt al-adabīyah*), (6) perpustakaan (*dawr al-kutub wa dawr al-'ilm*), dan (7) lembaga pendidikan sekolah (*al-madrasah*).

³⁵Ahmad Munjih Nasih dan Lilik Nur Kholilah, *Metode dan Teknik Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 6.

Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah bidang agama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui peyempurnaan sistem pendidikan agama menjadi terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. ³⁶ Pendidikan agama Islam memiliki posisi strategis dalam tataran praktis pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Sementara itu, tujuan pendidikan agama Islam di sekolah diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang diinternalisasikan ke dalam individu anak didik melalui proses pendidikan. Secara lebih rinci tujuan pendidikan agama Islam telah dirumuskan dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) yang telah disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), sesuai dengan mata pelajaran agama Islam yang diberikan, masing-masing tujuan tersebut sebagai berikut:

a. Bidang Studi Akidah Akhlak

- 1) Mendorong agar peserta didik meyakini dan mencintai aqidah Islam;
- Mendorong agar peserta didik benar-benar yakin dan takwa kepada Allah SWT;
- 3) Mendorong peserta didik untuk mensyukuri nikmat Allah SWT;
- 4) Menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia dan beradat kebiasaan yang baik.
- b. Bidang Studi al-Qur'an Hadis;

³⁶ Said Agil Husin al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 157.

- Membimbing peserta didik kearah pengenalan, pengetahuan, pemahaman dan kesadaran untuk mengamalkan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dn Hadis;
- Menunjang kelompok bidang studi yang lain dalam kelompok pengajaran agama Islam, khususnya bidang studi aqidah akhlak dan syari'ah;
- Merupakan mata rantai dalam pembinaan peserta didik kearah pribadi utama menurut norma-norma agama.

c. Bidang Studi Fikih

- 1) Menumbuhkan pembentukan kebiasaan dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah SWT sesuai ketentuan-ketentuan agama dengan ikhlas dan tuntunan akhlak mulia;
- 2) Mendorong tumbuh dan menebalkan iman;
- Mendorong tumbuhnya semangat untuk mengolah alam sekitar anugerah Allah;
- 4) Mendorong untuk mensyukuri nikmat Allah.
- d. Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam
 - Membantu peningkatan iman peserta didik dalam rangka pmbentukan pribadi muslim di samping memupuk rasa kecintaan dan kekaguman terhadap Islam dan kebudayaannya;
 - Memberi bekal kepada peserta didik dalam rangka melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi atau bekal untuk menjalani kehidupan pribadi mereka;

3) Mendukung perkembangan Islam masa kini dan mendatang, disamping meluaskan cakrawala pandangannya terhadap makna Islam bagi kepentigan kebudayaan umat manusia.³⁷

4. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

Secara terminologi, dasar adalah sesuatu yang dipakai sebagai landasan dalam berpijak, dan dari sanalah segala aktivitas yang berdiri di atasnya akan dijiwai dan diwarnai. ³⁸ Menurut Ahmad D. Marimba, pengertian dasar yang dianalogikan pada suatu bangunan adalah " bagian dari bangunan yang menjadi sumber kekuatan dan keteguhan tetap berdirinya bangunan itu". ³⁹

Dari uraian di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah suatu landasan yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pandangan hidup dan falsafah hidupnya. Dasar pendidikan agama Islam itu identik dengan sumber ajaran Islam, karena keduanya sama-sama bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis. Pada tataran selanjutnya dikembangkan pemahaman para ulama dengan pandangan-pandangan mereka dalam bentuk *qiyas syar'i* dan *ijma'* yang diakui, ijtihad dan tafsir yang benar dalam bentuk hasil pemikiran yang menyeluruh tentang jagad raya, manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan dan akhlak, dan pendapat tersebut, semata-mata

³⁹ Marimba, *Pengantar Filsafat...*, 41.

³⁷ Nasih, Metode dan Teknik, 9-10.

³⁸ Ahmad Humaidi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 100.

merujuk pada dasar pendidikan Islam, yaitu al-Our'an dan Hadis. 40 Oleh karena itu, nilai-nilai dalam kedua sumber hukum Islam tersebut harus ditanamkan kepada diri peserta didik. Dengan demikian, setiap pendidikan didasarkan pada pembentukan manusia yang terbaik, sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ali Imran [3]: 110 yang berbunyi:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah SWT. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mer<mark>eka</mark> adala<mark>h orang-orang</mark> yang fasik.⁴¹

Dasar-dasar pendidikan Islam tersebut menjadi ruh dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Menurut Arifin, tujuan pendidikan Islam adalah untuk menjadikan penganut agama yang baik, mentaati ajaran Islam dengan memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran sesuai dengan iman dan akidah Islamiyah. 42 Untuk mewujudkan tujuan ini mengacu pada nilai dasar dalam al-Qur'an dan Hadis.

Tujuan pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek jasmaniyah, tetapi juga intelektual serta emosional untuk menjadi manusia yang paripurna. Perilaku manusia hasil pendidikan Islam pada hekikatnya

⁴² Arifin, *Ilmu Pendidikan*..., 7.

⁴⁰ Omar Muhammad dan al-Toumy al-Shaybany, terj. Falsafah al-Tarbīyah al-Islāmīyah (Jakarta: Bualang Bintang, 1979), 399.

⁴¹ Al-Qur'an, 3 (Ali Imran), 110. Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 64.

dijiwai iman dan taqwa kepada Allah SWT.⁴³ Dalam konsep lain inilah yang disebut pribadi muslim yang *kaffah* serta memiliki keimanan.

Secara operasional, tujuan umum pendidikan agama Islam adalah membimbing anak agar mereka menjadi orang muslim sejati, beriman teguh, beramal salih, dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat, agama dan negara.⁴⁴

Tujuan pendidikan agama tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap orang yang melaksanakan pendidikan agama. Karena dalam mendidik agama yang perlu ditanamkan terlebih dahulu adalah keimanan yang teguh, sebab dengan adanya keimanan yang teguh itu maka akan menghasilkan ketaatan menjalankan kewajiban agama.

Selain itu tujuan pendidikan Islam juga untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 201 yang berbunyi:

Dan di antara mereka ada yang berkata, Ya Tuhan kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.⁴⁵

Tujuan umum pendidikan agama tersebut dengan sendirinya tidak akan dapat dicapai dalam waktu sekaligus, tetapi membutuhkan proses atau membutuhkan waktu yang panjang dengan tahap-tahap tertentu; dan setiap

⁴³ Djumbransah dan Malik Karim Amrullah, *Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 63.

⁴⁴ Ibid, 45.

⁴⁵ Al-Qur'an surat al-Bagarah [2]: 201. Departemen Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahannya..., 49.

yang dilalui itu juga mempunyai tujuan tertentu yang disebut dengan tujuan khusus.

Tujuan khusus pendidikan agama adalah tujuan pendidikan agama pada setiap tahap/tingkat yang dilalui, seperti tujuan pendidikan agama di SD, berbeda dengan tujuan pendidikan agama untuk sekolah menengah, dan berbeda pula untuk perguruan tinggi.⁴⁶

Selanjutnya konsep tujuan pendidikan agama Islam tidak boleh lepas dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yakni tujuan yang bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum, karena sesuai dengan konsep ketuhanan yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Tujuan tersebut terumus dalam istilah yang disebut *insan kamil* ⁴⁷(manusia sempurna)

5. Dasar Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah

a. Dasar Religius

Di antara dasar-dasar pelaksanaan pembelajaran PAI di MTs dalam al-Qur'an yaitu: surat al-Naḥl [16]: 43 dan 125, surat Ali Imrān [3]: 104, surat al-Tawbah [9]: 122, Sedangkan dari hadis di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri 48 yang artinya: "Siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah berikan pemahaman dalam masalah agama". 49

⁴⁸ Mustofa Muhammad H, *Jawahir al-Bukharī* (Kairo: al-Istiqamah, 1271 H.), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴⁶ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara kerjasama Binbaga Depag, 1997), 40.

⁴⁷ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), 132.

⁴⁹ Teks dan terjemahan atau hadis lihat dalam halaman lampiran.

b. Dasar Yuridis

- 1) Dasar ideal: Pancasila sebagai falsafah negara pada sila pertama
- 2) Dasar Konstitusional: UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2
- 3) Dasar Operasional: UU nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006, Permenag RI nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah.

c. Tujuan Pelaksanaan Pembelajaran PAI di Madrasah Tsanawiyah

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi pesrta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. ⁵⁰

⁵⁰ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7.

B. Konstruksi dan Rekayasa Kurikulum Pendidikan Agama Islam

1. Konstruksi Kurikulum

Diakui atau tidak sampai saat ini kita masih banyak mengacu pada konsep desain kurikulum yang dibawa dari Barat.⁵¹ Mereka dianggap lebih cerdas dan cepat dalam membaca peluang yang berkembang sehingga melahirkan inovasi-inovasi baru sebagai terobosan dalam bidang pendidikan. Sementara kita masih berkutat dalam proses mencari konsep kurikulum mana mana yang dianggap tepat dan relevan. Sering kali kurikulum mengalami perubahan, tetapi *outcome*-nya masih jauh dari harapan, bahkan sebagian ahli mengatakan pendidikan kita dianggap gagal.

Konsep desain pengembangan kurikulum yang penulis sajikan merupakan bagian kecil dari sekian banyak konsep yang berkembang saat ini. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan perbandiangan dan kajian bagi kita untuk senantiasa terus mengadakan inovasi dalam mengejar ketertinggalan terutama dalam bidang pendidikan. Proses perekayasaan kurikulum yang dilaksanakan berlangsung melalui tiga tahapan proses, yaitu konstruksi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan implementasi kurikulum. Konstruksi kurikulum adalah proses pembuatan keputusan yang membutuhkan hakikat dan rancangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah prosedur pelaksanaan pembuatan konstruksi dan implementasi kurikulum adalah proses pelaksanaan kurikulum yang dihasilkan oleh konstruksi dan pengembangan kurikulum.

Ketiga proses itu harus dapat dilaksanakan secara bersamaan.

⁵¹ Sebagian karya yang cukup komprehensif tentang konstruksi kurikulum adalah Laurie Brady and Kerry Kennedy, Curriculum Construction (Frenchs Forest, Australia: Pearson Higher Education, 5th Ed., 2014).

2. Desain Kurikulum

Desain adalah rancangan, pola, atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Tugas dan peran seorang desainer kurikulum sama seperti seorang arsitek. Seorang arsitek sebelum menentukan bahan dan cara mengkonstruksikan bangunan terlebih dahulu dia harus merancang model bangunan yang akan dibangun. Dalam mempertimbangkan desain kurikulum, seorang –atau lebih pembuat kurikulum akan dihadapkan pada pertanyaan: "Desain kurikulum seperti apa yang dapat saya kembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik untuk semua kalangan?" 52

Menurut George A. Beauchamp ".... Curriculum design may be defined as the substance and organization of goal and culture content so arranged as to reveal potential progression through levels of schooling". (Desain kurikulum dapat digambarkan sebagai unsur pokok, komponen hasil atau sasaran dan kultur yang membudaya).⁵³

Menurut Oemar Hamalik pengertian desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Fred Percival dan Henry Ellington dalam Hamalik mengemukakan bahwa desain kurikulum adalah pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum.⁵⁴

⁵⁴ Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵² A.C. Ornstein dan F.P. Hunkins, *Curriculum: Foundation, Principles, and Theory* (Boston: Allyn and Bacon, 1988), 232.

⁵³ George A Beauchamp, *Curriculum Theory* (Wilmette Illionis: The Kagg Press, 1976), 101.

Selanjutnya menurut Nana S. Sukmadinata desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum. Sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuensi bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. ⁵⁵

Desain kurikulum menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horisontal dan vertikal. Dimensi horisontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum. Susunan lingkup ini sering diintegrasikan dengan proses belajar dan mengajarnya. Dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuensi bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran.⁵⁶

Stephen Petrina menjelaskan bahwa

Curriculum design involves a form into which curriculum is cast or organized. Curriculum is generally organized through designs such as: Disciplines (e.g., mathematics, engineering, humanities, sciences); Fields (e.g., art, civics, design, home economics, industrial arts, social studies); Units (e.g., bicycling; child labor; feminism, jazz; mass media; queer fiction; verbs; water colors); Organizing Centers (e.g., activities, modules, minicourses, problems, processes, projects, tasks and competencies); or Personal Pursuits (e.g., aerobics, autobiography, cooking, bird watching, guitar playing). Core or Interdisciplinary designs employ combinations of disciplines or broad fields (Petrina, 1998). Disciplinary, field and interdisciplinary designs typically employ units and organizing centers to engage students in pre-structured knowledge. Here, problems and units are developed to establish

⁵⁵ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum..*, 113.

⁵⁶ Ibid.

understandings of organized bodies of disciplinary knowledge.⁵⁷

Desain kurikulum melibatkan bentuk mana kurikulum disajikan dan atau terorganisasi. Kurikulum pada umumnya diselenggarakan melalui desain seperti: Disiplin (misalnya matematika, teknik, humaniora, ilmu); Fields (misalnya seni, kewarganegaraan, desain, ekonomi rumah tangga, industri seni, IPS); Unit (misalnya bersepeda, pekerja anak, feminisme, jazz, media massa, fiksi aneh, kata kerja, warna air); Pengorganisasian Pusat (misalnya kegiatan, modul, minicourses, masalah, proses, proyek, tugas dan kompetensi); atau Pursuits Pribadi (misalnya aerobik, otobiografi, memasak, menonton burung, bermain gitar). Desain utama atau interdisipliner menggunakan kombinasi dari disiplin ilmu atau bidang yang luas (Petrina, 1998). Disiplin, lapangan dan desain interdisipliner biasanya menggunakan unit dan mengorganisasi pusatpusat untuk melibatkan para siswa dalam pengetahuan pra-terstruktur. Di sini, masalah dan unit yang dikembangkan untuk membangun pemahaman tubuh pengetahuan disiplin yang terorganisasi

Selanjutnya Petrina menjelaskan bahwa desain kurikulum umum yang dipilih untuk kekuasaannya di dalam penguatan penyebab politik dan perundingan status politik, dan sejak awal 1960-an, desain disiplin telah bernilai politis melebihi nilai-nilai yang lain. Humaniora dan ilmu sekolah tinggi yang menggunakan desain disiplin di awal tahun 1960-an mengamankan peran-peran ekonomi dan liberal. Proyek-proyek dan unit-unit memberikan status progresif pada 1910-an dan 1920-an bagi pendatang baru dalam kurikulum sekolah seperti seni industri, pendidikan audio visual dan ilmu sosial. Sama seperti metode pengajaran yang diasosiasikan dengan "keluarga" teoretis yang berbeda, desain kurikulum memiliki orientasi teoretis.⁵⁸

Penyusunan desain kurikulum dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip tetentu. Saylor dalam buku Oemar Hamalik mengajukan delapan prinsip untuk pendesainan kurikulum, sebagai berikut:

.

⁵⁷ Stephen Petrina, *Advanced Teaching Methods for the Technology Classroom* (Chocolate Avenue, USA: Idea Grpup Inc., 2007), 251.

⁵⁸ Ibid., 252.

- a. Desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar, sesuai dengan hasil yang diharapkan.
- b. Desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru;
- c. Desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah;
- d. Desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa
- e. Desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh diluar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah;
- f. Desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan, agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya;
- g. Kurikulum harus di desain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur; dan
- h. Desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima.⁵⁹

-

⁵⁹ Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, 193-194.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, menurut Mujamil, bahwa kurikulum madrasah perlu dikembangkan secara terpadu dengan menjadikan ajaran dan nilai-nilai agama sebagai petunjuk dan sumber konsultasi bagi pengembangan berbagai mata pelajaran umum, yang operasionalnya dapat dikembangkan dengan cara mengimplisitkan ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalam bidang studi IPA, IPS dan sebagainya, sehingga kesan dikotomis tidak terjadi. Kemudian model pembelajaran dapat dilaksanakan melalui *team teaching*, yakni guru bidang studi IPS, IPA, dan lainnya yang bekerjasama dengan guru PAI dalam penyusunan desain pembelajaran secara konkret dan detail untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran.⁶⁰

Secara garis besar, desain kurikulum dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: (a) desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar (*subject centered design*), (b) desain kurikulum yang berpusat pada peranan siswa (*learner centered design*), dan (c) desain kurikulum yang berpusat pada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat (*problem centered design*). ⁶¹

a. Subject Centered Design

Subject centered design atau yang lebih dikenal dengan desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran merupakan bentuk desain kurikulum yang paling populer, paling tua dan paling banyak digunakan. Dalam subject centered design, kurikulum dipusatkan pada isi atau materi

-

⁶⁰ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 157-158.

⁶¹ Ornstein dan Hunkins, *Curriculum: Foundation, Principles, and Theory*, 242; Geraldine O'neill, *Curriculum Design in Higher Education: Theory to Practice* (Dublin, Ireland: UCD Teaching & Learning, 2015), 33-35.

yang akan diajarkan. Kurikulum terdiri atas sejumlah mata-mata pelajaran. 62

Terdapat tiga bentuk kurikulum yang berorientasi pada mata pelajaran, yaitu: *subject matter design*, *disciplines design*, dan *broad-field design*. ⁶³

1) Subject Matter Design

Pada *subject design*, bahan atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, misalnya: mata pelajaran sejarah,ilmu bumi, kimia, fisika, berhitung dan lain sebagainya. Mata pelajaran itu tidak berhubungan satu sama lain. Pada pengembangan kurikulum di dalam kelas atau pada kebiasaan belajar mengajar, setiap guru hanya bertanggungjawab pada mata pelajaran yang diberikannya.

Desain ini berdasarkan pada keyakinan bahwa yang membuat manusia memiliki ciri khas dari makhluk lain adalah kecerdasan mereka. Dengan kata lain, dalam merencanakan suatu kurikulum akan lebih baik jika dipusatkan pada mata pelajaran yakni pengetahuan-pengetahuan sehingga manusia akan bertambah cerdas.

2) Disciplines Design

Bentuk ini merupakan pengembangan dari *subject matter design*, keduanya masih menekankan kepada isi atau materi kurikulum. Perbedaannya, pada *subject design* belum ada kriteria yang tegas tentang apa yang disebut *subject* (ilmu). Sementara pada *disciplines design* kriteria tersebut telah tegas, yang membedakan apakah suatu

_

⁶² Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik, 113.

⁶³ Ornstein dan Hunkins, Curriculum: Foundation, Principles, and Theory, 242-249.

pengetahuan itu. Perbedaan lain terletak pada tingkat penguasaan, discipline design tidak seperti subject design yang menekankan penguasaan fakta-fakta dan informasi tetapi pada pemahaman (understanding).⁶⁴

Bentuk ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan *subject design*, di antaranya adalah: *pertama*, kurikulum ini memiliki organisasi yang sistemik dan efektif tetapi juga dapat memelihara integritas intelektual manusia. *Kedua*, peserta didik tidak hanya menguasai serentetan fakta tetapi dapat menguasai konsep, hubungan, dan proses-proses intelektual yang berkembang pada siswa.

3) Broad-Field Design

Broad-filed design merupakan pengembangan dari subject design dan disciplines design. Dari dua desain tersebut masih menunjukkan adanya pemisahan antar mata pelajaran. Salah satu usaha untuk menghilangkan pemisahan tersebut adalah dengan mengembangkan the broad field design yakni desain yang menyatukan beberapa mata pelajaran yang berdekatan atau berhubungan menjadi satu bidang studi seperti sejarah, geografi, dan ekonomi digabung dalam pengetahuan sosial, dan sebagainya. 65

Broad field sudah merupakan perpaduan atau fusi dari sejumlah mata pelajaran yang berhubungan. Ciri umum dari broad-field ini adalah kurikulum terdiri dari suatu bidang pengajaran di mana di

⁶⁴ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, 116.

⁶⁵ Ornstein dan Hunkins, Curriculum: Foundation, Principles, and Theory, 245.

dalamnya berpadu sejumlah mata pelajaran yang saling berhubungan. Sedang tujuan dari desain ini adalah menyiapkan para siswa yang dewasa ini hidup dalam dunia informasi yang sifatnya spesial, dengan pemahaman yang bersifat menyeluruh.

b. Learner Centered Design

Learner centered design adalah desain kurikulum yang berpusat pada peranan siswa. Desain ini hadir sebagai reaksi sekaligus penyempurnaan terhadap beberapa kelemahan subject centered design. Desain ini berbeda dengan subject centered, yang berlatarbelakang dari citacita untuk melestarikan dan mewariskan budaya.

Learner centered hadir dari para ahli kurikulum yang memberikan pengertian bahwa kurikulum didesain dan dibuat untuk peserta didik. Desain ini memberikan tempat utama kepada peserta didik. Didalam pendidikan atau pengajaran yang belajar dan berkembang adalah peserta didik sendiri. Guru atau pendidik hanya berperan menciptakan situasi belajar-mengajar, mendorong, dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.⁶⁶

Ada dua ciri utama yang membedakan desain ini dengan subject centered, yakni: pertama, *learner centered* mengembangkan kurikulum dengan berpusat pada peserta didik dan bukan dari isi. Kedua, learner centered bersifat not-preplanned (tidak direncanakan sebelumnya). Ada beberapa variasi model *learner centered*, yakni kurikulum berpusat pada

.

⁶⁶ Ornstein dan Hunkins, Curriculum: Foundation, Principles, and Theory, 249.

anak didik (*child centered design*), kurikulum berpusat pada pengalaman (*experience-centered*).

1) Child Centered Design

Para penganjur *child-centered design* ini meyakini bahwa pembelajaran yang optimal adalah ketika siswa dapat aktif di lingkungannya. Pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kehidupan siswa di lingkungannya. Dengan demikian, *child centered design* harus berdasar kepada kehidupan, kebutuhan, dan kepentingan siswa.

2) Experience-Centered Design

Experience-centered design adalah desain kurikulum yang berpusat pada kebutuhan anak. Ciri utama dari experience-centered design adalah pertama, struktur kurikulum ditentukan oleh kebutuhan dan minat peserta didik. Kedua, kurikulum tidak dapat disusun terlebih dahulu, melainkan disusun secara bersama-sama oleh guru dengan para siswa. Ketiga, desain kurikulum ini menekankan prosedur pemecahan masalah.

Desain ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: pertama, karena kegiatan pendidikan didasarkan atas kebutuhan dan minat peserta didik, maka motivasi bersifat instrinsik dan tidak perlu dirangsang dari luar. Kedua, pengajaran memperhatikan perbedaan individual sehingga mereka mau ikut dalam kegiatan belajar kelompok karena membutuhkannya. Ketiga, kegiatan-kegiatan pemecahan masalah

memberikan bekal pengetahuan untuk menghadapi kehidupan diluar sekolah

c. Problem Centered Design

Problem centered design berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia (man centered). Berbeda dengan learner centered yang mengutamakan manusia atau peserta didik secara individual, problem centered design menekankan manusia dalam kesatuan kelompok yaitu kesejahteraan masyarakat. Konsep pendidikan para pengembang model kurikulum ini berangkat dari asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dan seringkali manusia juga menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan bersama-sama.

Konsep ini menjadi landasan pula dalam pendidikan dan pengembangan kurikulum. Berbeda dengan *learner centered*, kurikulum ini disusun terlebih dahulu (*pre-planned*). Isi kurikulum berupa masalah-masalah sosial yang dihadapi peserta didik sekarang dan yang akan datang. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan peserta didik sekarang dan yang akan datang. *Problem centered design* menekankan pada isi maupun perkembangan peserta didik. Ada dua variasi model desain kurikulum ini, yaitu *the areas of living design* dan *the core design*.

1) The Areas of Living Design

Desain kurikulum terhadap bidang kehidupan dimulai oleh Herbert Spencer pada abad ke-19, dalam tulisannya yang berjudul *What* knowledge is of most woth? ia mengungkapkan bahwa areas of living design menekankan prosedur belajar melalui pemecahan masalah sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk menghadapi kehidupannya di luar sekolah

Ciri lain dari model desain ini adalah dengan menggunakan pengalaman dan situasi-situasi nyata dari peserta didik sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang-bidang kehidupan sehingga desain ini selain mampu menarik minat peserta didik juga akan mampu mendekatkannya pada pemenuhan kebutuhan hidupnya dalam masyarakat.

Desain ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: pertama, the areas of living design merupakan the subject matter design tetapi dalam bentuk yang terintegrasi. Kedua, prinsip belajar aktif dapat diterapkan. Ketiga, menyajikan bahan ajar dalam bentuk yang relevan. Keempat menyajikan bahan ajar yang fungsional, dan kelima motivasi belajar datang dari dalam.

2) The Core Design

The core design timbul sebagai reaksi utama kepada separate subject design, yang sifatnya terpisah-pisah. Dalam mengintegrasikan bahan ajar, mereka memilih mata-mata pelajaran atau bahan ajar tertentu sebagai inti (core).

Terkait pengertian, banyak ahli yang memberikan pengertian dari *core curriculum* di antaranya adalah Saylor dan Alexander (1956)

yang mengatakan bahwa istilah core curriculum menunjuk pada suatu rencana yang mengorganisasikan dan mengatur bagian utama dari program pendidikan umum di sekolah. Faunce dan Bossing (1951) mendefinisikan bahwa istilah *core curriculum* menunjuk pada pengalaman belajar yang fundamental bagi peserta didik.⁶⁷

Adapun karakteristik dari *core curriculum* yang dikemukakan oleh Saylor dan Alexander (1956), antara lain:

- a) Program kurikulum inti melengkapi pendidikan umum, dan tujuan program adalah seluas dengan hasil dasar yang dicapai melalui program pendidikan umum.
- b) Kelas dalam kurikulum inti (core curriculum) disusun atau diatur untuk dua atau lebih periode kelas pada umumnya.
- c) Kegiatan-kegiatan dan pengalaman belajar disusun dalam bentu kesatuan dan tidak dibatasi oleh garis-garis pelajaran yang terpisahpisah.
- d) Guru kurikulum inti menggunakan metode pengajaran yang lebih fleksibel dan bebas.
- e) Program kurikulum inti menggunakan berbagai macam pengalaman belajar.
- f) Bimbingan merupakan bagian yang pokok dari kegiatan kurikulum inti.⁶⁸

_

⁶⁷ Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, 109.

⁶⁸ Ibid., 110-111.

3. Rekayasa Kurikulum

Rekayasa kurikulum adalah semua proses dan kegiatan yang diperlukan untuk memelihara dan menyempurnakan sistem kurikulum yang mencakup kepemimpinan oleh orang-orang yang menduduki jabatan seperti pengawas sekolah, kepala sekolah dan pengembang kurikulum yang dikenal sebagai otorita mengambil keputusan dan menetapkan tindakan-tindakan operasional.

Sistem kurikulum merupakan suatu sistem pengambilan keputusan dan tindakan untuk memfungsikan kurikulum dalam persekolahan. Fungsi utama sistem kurikulum adalah: (a) mengembangkan kurikulum, (b) menerapakan kurikulum dan (c) menilai efektivitas kurikulum dan sistem kurikulum. Dengan demikian istilah rekayasa kurikulum dipakai untuk menggambarkan proses dinamika sistem kurikulum dan sistem persekolahan. Tujuan umum dari sistem kurikulum dari berbagai sistem persekolahan adalah memberikan kerangka kerja untuk menentukan apa yang harus diajarkan di sekolah dan untuk memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh pemerintah sebagai dasar untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Bennie dan Newstead (1999) menegaskan bahwa setiap perubahan selalu menemui kendala dalam implementasinya. Terkait dengan perubahan kebijakan kurikulum, beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kendala mencakup antara lain waktu, harapan-harapan dari pihak orang tua, kelangkaan bahan pembelajaran termasuk buku-buku pelajaran pada saat implementasi kurikulum yang baru, kekurangjelasan konsep kurikulum yang baru, dan guru-guru kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan dikaitkan dengan kurikulum baru tersebut.

Sedangkan Nolder (1990) dan Snyder dkk. (1992) menyatakan bahwa kendala lain menyangkut kemungkinan beban mengajar yang bertambah, peran guru yang berubah sebagai fasilitator, dan sistem pelaporan. Pada umumnya hambatan yang ditemui dalam implementasi suatu kurikuum adalah kurangnya kompetensi guru-guru. Seringkali terjadi bahwa implementasi kurikulum baru tidak diikuti dengan pertimbangan kemampuan guru dan tindakan bagaimana meningkatkan kemampuan guru-guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum dimaksud.

Hargreaves (1995) dan Fennema dan Franke (1992) yang menyatakan bahwa kemampuan baik secara keterampilan dan pengetahuan seorang guru mempengaruhi proses pembelajaran di kelas dan menentukan sejauh mana kurikulum dapat diterapkan.

Taylor dan Vinjevold (1999) mengungkapkan bahwa kegagalan implementasi kurikulum disebabkan oleh rendahnya pengetahuan konseptual guru, kurang penguasaan terhadap topik yang diajarkan, dan kesalahan interpretasi dari apa yang tertulis dalam dokumen kurikulum.

Sementara Oemar Hamalik (2008) menyatakan bahwa Rekayasa kurikulum adalah proses penciptaan kurikulum yang dilakukan dalam situasi yang nyata di sekolah yang melibatkan berbagai organisasi yang menuntut keterampilan para partisipan dan berbagai komponen agar menghasilkan kurikulum yang diinginkan. Rekayasa kurikulum berlangsung melalui tiga proses, yakni: (1) konstruksi kurikulum, (2) pengembangan

kurikulum, dan (3) implementasi kurikulum.

Konstruksi kurikulum adalah proses pembuatan keputusan yang menentukan hakikat dan rancangan urikulum. Pengembangan kurikulum adalah prosedur pelaksanaan pembuatan konstruksi kurikulum dan, implementasi kurikulum adalah proses pelaksanaan kurikulum yang dihasilkan oleh konstruksi dan pengembangan kurikulum.

Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa yang akan datang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan berani menghadapi, mampu memecahkan dan berhasil mengatasi masalah kehidupan yang dihadapinya. Oleh karena itu pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi kompetensi peserta didik.

Proses konstruksi kurikulum pada umumnya mendapat perhatian yang luas dalam pembahasannya, karena menjadi landasan dalam membuat keputusan. Dalam proses pengembangan kurikulum mencakup dua hal pokok, yaitu: 1) fondasi atau landasan pengembangan kurikulum, dan 2) komponen-komponen kurikulum. Pembahasan tentang pengembangan kurikulum dititikberatkan pada dinamika pengembangan kurikulum, dan ketika itu lebih banyak berbicara tentang berbagai model pengembangan urikulum dalam berbagai model dan versi, sesuai dengan kepakaran yang bersangkutan. Sementara itu implementasi lebih banyak memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan perubahan kurikulum.

Pasti tidak mudah, dalam merekayasa kurikulum membutuhkan kosekuensi yang besar, khususnya dalam penjadwalan, karena lagi-lagi sekolah dibebankan untuk mengajarkan begitu banyak pelajaran dan menuntut siswanya menguasai semua pelajaran dengan baik dalam waktu yang bersamaan, sehingga tetap akan mempengaruhi jam mata pelajaran lain namun itulah konsekuensi dari sebuah tujuan khusus. Karena bila tidak ada langkah berani untuk merekayasa kurikulum, memilih tujuan paling penting yang harus dicapai siswa maka proses pendidikan hanya akan terjadi seperti umumnya. Dimana pelajaran belum benar-benar mengembangkan kecerdasan siswa dan belum cukup siap membekali dengan kecakapan khusus yang akan mereka gunakan pasca studi.

Memang sesuatu yang sangat menarik bila dikaji tentang tingkat kebakuan kurikulum pendidikan kita. Entah memang desainnya harus seperti itu, atau memang sudah menjadi aturan "keramat" bahwa kurikulum harus dibuat sedemikian rumit dengan memaksakan begitu banyak indikator pencapaian dari begitu banyak pelajaran. Dari hal seperti itu timbul pertanyaan menggelitik, apakah aturan baku dalam kurikulum itu sudah diatur dan terukur atau hanya aturan baku belaka.

Dari seluruh pembahasan pada kajian pustaka ini penulis menyusun Alur *theoretical framework* sebagaimana gambar di bawah ini.

C. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

2. Pengertian Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (*curriculum developer*) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. Di samping itu masyarakat dan mereka yang belajar mengalami perubahan maka langkah awal dalam perumusan kurikulum ialah penyelidikan mengenai situasi (*situation analysis*) yang kita hadapi, termasuk situasi lingkungan belajar secara menyeluruh, situasi peserta didik, dan para calon pengajar yang diharapkan melaksanakan kegiatan.

Teori pengembangan kurikulum, khususnya pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) seperti yang dikemukakan oleh Muhaimin,⁶⁹ sebagai: (1) kegiatan yang menghasilkan kurikulum PAI; atau (2) proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik, dan/atau (3) kegiatan penyusunan (*desain*), pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum PAI.⁷⁰

⁶⁹ Lihat biografi dan karya-karyanya. Nama lengkap Prof. Dr. H. Muhaimin, MA. Lahir di Lumajang 11 Desember 1956. Pekerjaan dosen tetap/guru besar Ilmu Pendidikan Agama Universitas Negeri Malik Ibrahim Malang, beberapa karya yang terdeteksi diantaranya; karya buku yang telah diterbitak ada 26 buah termasuk Pengembangan Kurikulum PAI, penelitian yang pernah dilakukan sebanyak 18 kali, ada 13 buku dikatat yang telah disusunnya,188 makalah yang telah diseminarkan, 36 tulisan yang pernah dimuat di majalah dan surat kabar,termasuk menjadi assesor BAN-PT baik assesor program studi baik S1 dan S2 maupun assesor institusi.

⁷⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), 10-11.

Sejarah penggunaan kurikulum di Indonesia setelah merdeka menyebutkan, ada sebelas kurikulum yang pernah dipakai yaitu kurikulum 1947, 1949, 1952, 1964, 1968, 1957, 1984, 1994, 2004 (KBK) yang disempurnakan menjadi kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Pada setiap periode kurikulum yang pernah diberlakukan tersebut model konsep kurikulum yang digunakan, prinsip dan kebijakan pengembangan yang digunakan, serta jumlah jenis mata pelajaran berikut kedalaman dan keluasannya tidak sama.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* kata "pengembangan" secara etimologi yaitu berarti proses/cara, perbuatan mengembangkan.⁷¹ Secara istilah, kata pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, dimana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan.⁷² Bila setelah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah kegiatan pengembangan tersebut.

Pengertian pengembangan di atas, berlaku pula dalam bidang kajian "kurikulum", kegiatan pengembangan kurikulum mencakup penyusunan kurikulum itu sendiri, pelaksanaan di sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif, dan penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut atas dasar

⁷¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁷² Hendayat Sutopo, Westy Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 45.

hasil penilaian.⁷³ Bila kurikulum itu sudah cukup dianggap mantap, setelah mengalami penilaian dan penyempurnaan, maka berakhirlah tugas penyempurnaan kurikulum tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan tugas pembinaan. Hal ini berlaku pula untuk setiap komponen kurikulum, misalnya pengembangan metode mengajar, pengembangan alat pelajaran dan sebagainya.

Selaras dengan pengertian dan pemahaman di atas, adalah pendapat Ahmad dan kawan-kawan dalam buku *Pengembangan Kurikulum* yang mengatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu proses merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu.⁷⁴

Kedua pendapat di atas apabila diklasifikasi meliputi beberapa unsur: (1) perencanaan, (2) penyusunan, (3) pelaksanaan, (4) penilaian, (5) usaha penyempurnaan. Berpijak pada unsur-unsur ini, dapatlah peneliti simpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum sekolah, kemudian diaplikasikannya ke dalam kelas sebagai wujud proses belajar mengajar disertai dengan penilaian-penilaian terhadap kegiatan tersebut, sebagai langkah penyempurnaan

73 A. Hamid Syarif, *Pengembangan Kurikulum* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 33.

⁷⁴ H.M. Ahmad, dkk. *Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 64.

sehingga memperoleh hasil yang lebih baik dan bagus.

Pengembangan kurikulum suatu proses siklus, yang tidak pernah ada starting dan tidak pernah berakhir. Hal ini disebabkan pengembangan kurikulum itu merupakan suatu proses yang tertumpu pada unsur-unsur dalam kurikulum, yang di dalamnya meliputi tujuan, isi (materi), metode, organisasi dan penilaian itu sendiri. 75

2. Landasan Pengembangan Kurikulum

Dalam pengembangan kurikulum, banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum mengambil suatu keputusan. Apapun jenis kurikulumnya pasti memerlukan azas-azas yang harus dipegang. Azas-azas tersebut cukup kompleks dan tidak jarang memiliki hal-hal yang bertentangan, karenanya harus melakukan seleksi. ⁷⁶

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam selurh kegiatan pendidikan, menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, penyusunan kurikulum tidak dapat dikerjakan sembarangan. Pengembangan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Kalau landasan pembuatan sebuah gedung tidak kokoh, yang akan ambruk adalah gedung tersebut, tetapi kalau landasan pendidikan, khususnya

 ⁷⁵ Syarif, Pengembangan Kurikulum..., 34.
 76 Idi, Pengembangan Kurikulum..., 67.

kurikulum yang lemah, yang akan ambruk adalah manusianya.

Untuk itu, dalam pengembangan kurikulum sedikitnya ada tiga landasan dalam mengembangkan kurikulum, yaitu landasan filosofi, landasan psikologi, dan landasan sosiologi. Masing-masing landasan sangat berperan dalam langkah pengembangan kurikulum. Variabilitas kurikulum yang diguanakan berimplikasi terhadap variabilitas penggunaan mata pelajaran yang harus dipelajari. Secara umum dapat dijelaskan karena adanya substansi determinan atau landasan kurikulum yang digunakan tidak sama. Meskipun unsur-unsur determinan itu sama yaitu faktor filosofis, sosiologis, psikologis, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun pada setiap masa memiliki suatu kecenderungan sendiri yang menjadi warna dominan dari kurikulum tersebut, sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan. Perbedaan ini juga turut menentukan mata pelajaran apa saja yang harus dipelajari, juga prinsip-prinsip cara mempelajari mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum yang bersangkutan.

Dalam pembahasan ini dikemukakan beberapa landasan pengembangan kurikulum yang dalam hal ini diketahui landasan dalam perubahan pengembangan kurikulum yang mengacu pada tiga unsur, yaitu:

- a. Nilai dasar yang merupakan falsafah dalam pendidikan manusia seutuhnya;
- b. Fakta empirik yang tercermin dalam pelaksanaan kurikulum, baik berdasarkan penilaian kurikulum, studi maupun survey lainnya, dan
- c. Landasan teori yang menjadi orientasi pengembangan kurkulum.⁷⁷

⁷⁷ Depdikbud, Landasan Kurikulum: Program Modul Akta IV (Jakarta: Dirjen Dikti, 1986), 1.

.

Landasan tersebut dapat disebut dengan determinan (faktor penentu) dalam penyususnan pengembangan kurikulum. Selanjutnya landasan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1) Landasan Filosofis

Pendidikan berintikan interaksi antarmanusia, terutama antara pendidik dan terdidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam interaksi tersebut terlibat isi yang diinteraksikan serta proses bagaimana interaksi tersebut berlangsung. Apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik dan terdidik, apa isi pendidikan dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang mendasar, yang esensial, yaitu jawaban-jawaban filosofis. ⁷⁸

Filsafat pada dasarnya adalah suatu pandangan hidup yang ada pada setiap orang. Dengan kata lain, bahwa setiap orang mempunyai filsafat dalam arti pandangan hidup pada dirinya. Berkenaan dengan pendidikan, setiap orang mempunyai pandangan tertentu mengenai pendidikan. Berdasarkan pandangan hidup manusia itulah tujuan kurikulum dirumuskan.

Walaupun pemikiran filosofis ini dikenal dengan sebutan yang berbeda, dan dalam sekolah juga terdapat falsafah pendidikan, pada umumnya terdapat empat falsafah, yaitu rekonstruktivisme,

_

⁷⁸ Nana Syaodih Sukmadinata *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 38.

perenialisme, esensialisme, dan progresivisme.⁷⁹

Aliran filsafat perenialisme, esensialisme, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum subjek-akdemis. Sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara, filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional.

Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Oleh karena itu, dalam praktik pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara elektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan. Meskipun demikian, saat ini pada beberapa negara dan khususnya di Indonesia, tampaknya mulai terjadi pergeseran landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu dengan lebih menitikberatkan pada filsafat rekonstruktivisme.

Tujuan pendidikan Indonesia tentu saja bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia, yakni Pancasila. Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasilais. Dengan kata lain, landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia adalah sesuai dengan kandungan falsafah pancasila itu

⁷⁹ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 62.

sendiri. Oleh kaena itu, filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dari pemikiran filsafat untuk memecahkan permasalahan pendidikan, dan pendidikan bukan saja ada dalam sekolah tetapi juga ada bersama kehidupan masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dalam masyarakat merupakan alat untuk melestarikan apa ang dikehendaki oleh masyarakat melalui pendidikan dalam arti seluasluasnya. 80 Segala kehendak masyarakat merupakan sumber nilai yang memberikan arah pada pendidikan. Dengan demikian, pandangan dan wawasan dalam pendidikan (atau dapat dikatakan bahwa filsafat yang hidup dalam masyarakat) merupakan landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Filsafat boleh jadi didefinisikan sebagai suatu studi tentang hakikat realitas, ilmu pengetahuan, sistem nilai, nilai kebaikan, keindahan dan hakikat pikiran. 81 Oleh karena itu landasan filosofis penyusunan pengembangan kurikulum tidak lain merupakan hakikat realitas, ilmu pengetahuan, sistem nilai, niali kebaikan, keindahan dan hakikat pikiran yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian secara logis-realistis, landasan filosofis perubahan pengembangan kurikulum berbeda dengan sisitem pendidikan lain.⁸²

-

⁸⁰ Rika T. Joni, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru dalam Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI* (Jakarta: PT. Grasindo, 1983), 6.

⁸¹ H. Larry Winccoff, Curriculum Development and Intructional Palnning (Jakarta: Depdikbud, 1989),13.

⁸² Landasan Filosofis penyusunan, penyempurnaan Kurikuum juga berbeda dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Perubahan tersebut sangat terasa dalam masyarakat yang pluralis. Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta:PT. Renika Cipta,1999), 209.

Adanya landasan filosofis dalam perubahan pengembangan kurikulum dalam pandangan Muhajir, dapat dipastikan bahwa nilai dasar yang digunakan adalah falsafah pendidikan manusia seutuhnya. Lebih tegasnya bahwa dalam perubahan pengembangan kurikulum substansi *naqlīyah* atau wahyu digunakan landasan filosofis idealisme. Sedangkan substasi 'aqlīyah ditempatkan sebagai landasan filosofis realismenya. Dalam dunia pendidikan, kedua landasan filosofis tersebut dipertemukan dalam filsafat esensialisme.⁸³

Dari paparan tesebut, yang menjadi landasan filosofis dalam perubahan pengembangan kurikulum setidaknya adalah idealisme. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat tertua yang digagas oleh Plato. Ciri utama aliran ini adalah pendekatan rasio terhadap semua masalah dengan menggunakan cara berpikir deduktif. ⁸⁴ Dalam hal kebenaran, kaum idealis seperti dikatakan Johnson berasumsi bahwa:

Kebenaran berada terpisah dari individu atau masyarakat tempat ia berada/hidup. Kebenaran harus didapatkan, dan oleh karena itu kebenaran dianggap bersifat mutlak. Idealisme lebih menekankan pada aspek intelektual, tetapi agak mengabaikan aspek fisik. Hal ini dapat dipahami karena aliran ini menginginkan pendidikan diarahkan kepada usaha pewarisan kekayaan kultural yang mengandung kebenaran sepanjang masa dalam masyakrakat. Diharapkan peserta didik bergerak mendekati hal-hal yang ideal dengan mencontoh guru terutama dalam mendiskusikan

Sunan Kalijaga (Yogjakarta:tp., 1996), 18.

84 Philip G. Smith, *Philosophy of Education* (New York: Harper, 1965), dalam Muhajir. *Landasan Filosofis Penyususnan Kurikulum*, 18-19.

_

⁸³ Dalam menghadapi akselerasi ilmu, teknologi, dan penyempurnaan sosial, operasionalisasi penyusunan dan pengembangan kurikulum perlu menggunakan rasionalisme akademik dan rekonstruksi sosial; tanpa meninggalkan landasan filosofik idelisme, realisme, dan filsafat esensialisme. Muhajir, Landasan Filosofis Penyususnan Kurikulum, Fakultas Pascasarjana IAIN

idea-idea.85

Asumsi ini kemudian menyebabkan kaum idealis pada umumnya sepakat bahwa banyaknya materi pendidikan yang digunakan belum menjadi jaminan yang memadai bagi suatu pendidikan, sekalipun materi tersebut dapat membantu mengajar peserta didik dalam hal keterampilan seperti membaca, namun kaum idealisme tidak mengerti mengapa keterampilan yang demikian itu juga tidak dapat diajarkan dalam cara yang mampu mengembangkan kemampuan konseptual. Bacaan yang digunakan secara luas di lembaga pendidikan bagi para peseta didik hanya berfungsi sebagai bahan tambahan bacaan. Mereka mendukung gagasan tentang adanya hubungan moral dan patriotisme yang harus diberikan kepada peserta didik melalui bacaan, sekaligus membantu peserta didik untuk belajar membaca dan mendorong berpikir mengenai gagasan yang mencakup kebenaran.

Guru harus mampu menggagas dan mendorong perhatian peserta didik di dalam kelas dengan tetap memperhatikan tingkat perkembangan mereka. Merujuk pada pernyataan dalam al-Qur'an yang menyebutkan:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesunguhnya mempersekutukan

_

⁸⁵ Harold T. Johnson, *Foundation of Curriculum* (Columbus: Charles E. Merril Publishing Campany, 1968) dalam Dimyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, 32.

(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". 86

Maka sesunguhnya tidak berlebihan jika para idealis menegaskan bahwa guru tidak senantiasa harus dilengkapi bahan bacaan untuk menggunakannya sebagai materi, kecuali hanya gagasan yang dapat mengubah kehidupan. Gagasan itulah yang menyebabkan kehidupan seluruh masyarakat mengalami proses transformasi. Para idealis juga berpikir bahwa peserta didik dapat menjadi lebih berharga dan rasional ketika mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Sebab, mereka percaya bahwa hanya gagasan yang dapat mengubah kehidupan.

2) Landasan Psikologi

Pengetahuan psikologi akan membantu para pengembang kurikulum untuk lebih realistis dalam memilih tujuan-tujuan, tetapi tidak menentukan tujuan-tujuan apa yang seharusnya. Dalam memilih pengalaman belajar yang akurat, psikologi secara umum sangat membantu. Teori-teori belajar, kognitif, pengembangan emosional, dinamika grup, perbedaan kemampuan individu, kepribadian, model formasi sikap dan perubahan, serta mengetahui motivasi, semuanya sangat relevan dalam merencanakan pengalaman-pengalaman pendidikan (*educational experience*).⁸⁷

Perkembangan atau kemajuan-kemajuan yang dialami anak sebagian besar terjadi karena usaha belajar, baik berlangsung melalui

87 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum..., 80.

⁸⁶ Al-Qur'an, 31 (Luqman), 13. Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya...,412

proses peniruan, pengingatan, pembiasaan, pemahaman, penerapan, maupun pemecahan masalah. Pendidik atau guru melakukan berbagai upaya, dan menciptakan berbagai kegiatan dengan dukungan berbagai alat bantu pengajaran agar anak-anak belajar. Cara belajar mengajar mana yang dapat memberikan hasil secara optimal serta bagaimana proses pelaksanaannya membutuhkan studi yang sistematik dan mendalam. Studi yang demikian merupakan bidang pengkajian dari psikologi belajar.

Di antara cabang-cabang psikologi yang paling penting diperhatikan bagi landasan pengembangan kurikulum adalah psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam penetapan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalaman bahan pelajaran sesuai dengan taraf perkembangan anak.⁸⁸

Psikologi belajar digunakan sebagai landasan dalam menampilkan tujuan pembelajaran umum/standar kompetensi/SK (tentative general objective) yang sudah dirumuskan untuk merumuskan presice education (kompetensi dasar/KD), dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar yang akan dirumuskan dalam kurikulum. Sedangkan psikologi perkembangan lebih berperan dalam pengorganisasian pengalaman-pengalaman belajar, yaitu pada tingkat pendidikan mana atau pada kelas berapa suatu

88 Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), 14.

.

pengalaman belajar tertentu harus diberikan karena harus sesuai dengan perkembangan jiwa anak. Pada dasarnya dua landasan psikologi tersebut sangat diperlukan dalam pengembangan kurikulum yaitu pada langkah merumuskan tujuan pembelajaran, menyeleksi dan mengorganisasi pengalaman belajar.

3) Landasan Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial hubungan antara individu dengan individu, antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari anak selalu bergaul dengan lingkungan atau dunia sekitar. Dunia sekitar merupakan lingkungan hidup bagi manusia.⁸⁹

Jadi sosiologi mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya satu dengan yang lain. Dengan kata lain, sosiologi berkaitan dengan aspek sosial atau masyarakat.

Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita ketahui bahwa pendidikan mempersiapkan generasi muda untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi memberikan bekal pengetahuan,

٠

⁸⁹ Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 62.

keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Anak-anak berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan bagi kehidupan dalam masyarakat pula. Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya, menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan.

Dengan pendidikan, kita dapat mengharapkan muncul manusiamanusia yang lain dan asing terhadap masyarakatnya, tetapi manusia yang lebih bermutu, mengetahui, dan mampu membangun masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan masyarakat tersebut. 90

Dalam merumuskan tujuan kurikulum harus memahami tiga sumber kurikulum yaitu siswa (student), masyarakat (society), dan konten (content). Sumber siswa lebih menekankan pada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan siswa pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan perkembangan jiwa atau usianya. Sumber masyarakat lebih melihat kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, sedangkan sumber konten adalah berhubungan dengan konten kurikulum yang akan dikembangkan pada tingkat pendidikan yang sesuai. Dengan kata

90 Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum..., 58.

.

lain, landasan sosiologi digunakan dalam pengembangan kurikulum dalam merumuskan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan sumber masyarakat (society source) agar kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pendidikan merupakan proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam kontek inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Realitas sosial budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat merupakan bahan dasar dalam kajian penyusunan, perkembangan kurikulum. Masyarakat adalah kelompok individu yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok yang berbeda. 91 Masyarakat dan individu di sini memiliki hubungan dan pengaruh yang bersifat timbal balik.⁹²

Nilai sosial-budaya masyarakat bersumber pada hasil karya akal budi manusia, sehingga dalam menerima, menyebarluaskan, melestarikan dan melepaskannya manusia menggunakan akalnya.

-

⁹¹Robert S. Zais, *Curriculum Principles and Foundation* (Ner York: Harper & Row Publisher, 1976) dalam Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet., 2, 2007),157.

⁹²Masyarakat sebagai sekelompok individu memiliki pengaruh terhadap individu-individu dan begitu juga sebaliknya. Kebersamaan individu-individu dalam masyarakat diikat dan terikat oleh nilai-nilai yang menjadi pegangan hidup mereka dalam interaksi. Nilai-nilai yang perlu dipertahankan dan dihormati oleh setiap individu dalam masyarakat. Mencakup nilai keagamaan dan sosial budaya. Nilai-nilai keagamaan berhubugan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap ajaran agama yang mereka anut. Oleh karena itu, nilai keagamaan pada umumnya bersifat langgeng sampai masyarakat pemeluknya melepaskan kepercayaannya. Raka T. Joni, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru dalam Mencari Strategi Pengembangan Nasional Menjelang Abad XXI* (Jakarta: PT. Grasindo, 1991), 5.

Sedangkan nilai agama bersumber dari kitab suci yang telah diwahyukan oleh Tuhan melalui Rasul-Nya. Dengan demikian, nilai sosial bdaya lebih bersifat sementara bila dibanding dengan nilai agama.

3. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang dicetuskan dan ditetapkan oleh sekolah secara dinamis dan progresif. Hal ini berati, bahwa kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat yang sedang membangun. 93 Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mengacu dan berdasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan, dan kebutuhan daerah, serta kebutuhan bangsa itu sendiri, sehingga terwujudlah tujuan dan cita-cita bersama, mulai tingkat yang mendasar sampai pada skala nasional.

Ada beberapa prinsip pengembangan kurikulum secara umum yang perlu dibahas terlebih dahulu sebelum mengkaji prinsip pengembangan secara khusus, sebagai berikut:

93 Subandiyah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum* (Jakarta: Grafindo Persada, 1993), 48.

b. Prinsip Relevansi

Relevansi mempunyai kedekatan hubungan sesuatu dengan apa yang terjadi. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, berarti perlunya kesesuaian antara program pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan bila hasil yang diperoleh akan berguna bagi kehidupan seseorang. 94

Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki dalam program kurikulum:95

- 1) Relevansi keluar, yaitu:
 - a) Kesesuaian atau keserasian antara pendidikan dengan lingkungan hidup siswa;
 - b) Kesesuaian antara pendidikan dengan kehidupan anak didik di saat sekarang dan yang akan datang;
 - c) Kesesuaian antara pendidikan dengan tuntutan dunia kerjanya bagi siswa.
 - d) Kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹⁶
- 2) Relevansi ke dalam, yaitu:

Kurikulum juga harus memiliki relevansi di dalam yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum,

⁹⁴ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 179. ⁹⁵ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, 150.

⁹⁶ Subandiyah, Pengembangan..., 49.

yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian dan penilaian. Relevansi internal ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. ⁹⁷

c. Prinsip Fleksibelitas

Fleksibelitas berarti tidak kaku, dan ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Di dalam kurikulum, fleksibelitas dapat dibagi menjadi dua macam, yakni: 98

1) Fleksibelitas dalam memilih program pendidikan

Fleksibelitas di sini maksudnya adalah bentuk pengadaan programprogram pilihan yang dapat berbentuk jurusan, program spesialisasi, ataupun program-program pendidikan keterampilan yang dapat dipilih murid atas dasar kemampuan dan minatnya.

2) Fleksibelitas dalam pengembangan program pengajaran

Fleksibelitas di sini maksudnya adalah dalam bentuk memberikan kesempatan kepada pendidik dalam mengembangkan sendiri program-program pengajaran dengan berpatok pada tujuan dan bahan pengajaran di dalam kurikulum yang masih bersifat umum.

Memberi kebebasan terhadap ruang gerak peserta didik dan pendidikan dalam bertindak di lapangan. Hal ini dikarenakan dalam diri anak didik terdapat banyak perbedaan-perbedaan dalam segala hal; bakat, kemampuan membaca, menulis (belajar), keterampilan, dan sebagainya. Dengan demikian sekolah dapat memberi fasilitas yang luas terhadap siswa. Dengan terbentuknya pengadaan program pilihan,

^

⁹⁷ Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, 151.

⁹⁸ Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum..., 182.

jurusan, program spesialisasi, program pendidikan keterampilan dalam dan program-program lain yang dapat dipilih siswa atas dasar kemampuan, kemauan serta minat dan bakat yang dimilikinya. 99

Begitu juga seorang guru sedapat mungkin mengembangkan sendiri program-program pengajarannya, dengan berpatokan dan berpegang teguh pada tujuan dalam pengajaran di dalam kurikulum yang masih bersifat umum. Upaya-upaya di atas dilakukan agar rancangan kurikulum dan pengembangannya serta praktiknya di lapangan dapat akomodatif di setiap saat dan kesempatan yang ada di sekolah.

d. Prinsip Kontinuitas

Dengan prinsip kontinuitas ini, perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau tidak berhenti-henti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan secara serempak bersamasama, perlu selalu ada komunikasi dan kerjasama antara para pengembang kurikulum sekolah dasar dengan SMTP, SMTA, dan Perguruan Tinggi. 100 Bahkan kesinambungan antara satu bidang studi dengan berbagai bidang studi lainnya untuk menghindari tumpang-tindihnya materi pelajaran yang dilaksanakan pada satuan pendidikan.

99 Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 127.

-

Prinsip kesinambungan dalam pengembangan kurikulum menunjukkan adanya saling terkait antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi. Minimal ada dua kesinambungan dalam pengembangan kurikulum ini: 101

1) Kesinambungan di antara berbagai tingkat sekolah

- a) Bahan pelajaran (*subject matters*) yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi hendaknya sudah diajarkan pada tingkat pendidikan sebelumnya atau di bawahnya.
- b) Bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak harus diajarkan lagi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga terhindar dari tumpangtindih dalam pengaturan bahan dalam proses belajar mengajar.

2) Kesinambungan di antara berbagai bidang studi

Kesinambungan di antara berbagai bidang studi menunjukkan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, untuk mengubah angka temperatur dari skala Celcius ke skala Fahrenheit dalam IPA, diperlukan keterampilan dalam pengalian pecahan. Karenanya, pelajaran mengenal bilangan pecahan tersebut hendaknya sudah diberikan sebelum anak didik mempelajari cara mengubah temperatur itu.

٠

¹⁰¹ Idi, Pengembangan Kurikulum..., 182.

e. Prinsip Praktis

Prinsip keempat adalah praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prisip efisiensi. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum kalau menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal pula biayanya, maka kurikulum itu tidak praktis dan sukar dilaksanakan. 102

Prinsip efisiensi sering kali dikonotasikan dengan prinsip ekonomi yang berbunyi: Dengan modal atau biaya, tenaga, dan waktu yang sekecil-kecilnya akan dicapai hasil yang memuaskan. Efisiensi proses belajar mengajar akan tercipta, apabila usaha, biaya, waktu dan tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran tersebut sangat optimal dan hasilnya dapat dicapai seoptimal mungkin, tentunya dengan pertimbangan yang rasional dan wajar. ¹⁰³

Dalam pengembangan kurikulum, prinsip efisiensi harus mendapat perhatian termasuk efisiensi segi waktu, tenaga, peralatan, dan biaya. Efisiensi waktu perlu direncanakan kegiatan belajar siswa agar tidak banyak membuang waktu di sekolah. Efisiensi penggunaan tenaga dan peralatan perlu ditetapkan jumlah minimal siswa yang harus dipenuhi oleh sekolah dan cara menentukan jumlah guru yang dibutuhkan. Dengan mengusahakan tercapainya berbagai segi efisiensi di atas,

-

¹⁰² Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum..., 151.

¹⁰³ Idi, Pengembangan Kurikulum..., 181.

diharapkan dapat dicapai efisiensi dalam pembiayaan pendidikan. 104

f. Prinsip Efektivitas

Efektivitas dalam kegiatan berkenaan dengan sejumlah apa yang direncanakan atau diinginkan dapat dilaksanakan dan dicapainya. 105 Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pendidikan dan proses belajar mengajar yaitu berkenaan dengan masalah efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Efektivitas mengajar guru berkaitan dengan sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Efektivitas belajar siswa, berkaitan dengan sejauh mana tujuantujuan pelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. 106 Efektivitas belajar mengajar dalam dunia pendidikan mempunyai keterkaitan erat antara guru dan siswa kepincangan salah satunya akan membuat terhambatnya pencapaian tujuan pendidikan.

Prinsip pengembangan kurikulum yang lebih khusus berkenaan dengan penyusunan tujuan, isi, pengalaman belajar dan penilaian. Interaksi antara keempat komponen tersebut selalu mendapat perhatian dalam pengembangan kurikulum.

Berikut ini diuraikan dengan lebih mendetail tentang prinsipprinsip khusus di atas.

A. Hamid Syarif, *Pengenalan Kurikulum* (Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1993), 51.
 Subandiyah, *Pengembangan...*, 51.

¹⁰⁶ Abdullah Idi, Pengembangan, 181.

1) Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan

Tujuan menjadi pusat dan arah semua kegiatan pendidikan. Tujuan tersebut hendaknya dirumuskan secara spesifik dan operasional seluruh kegiatan belajar mengajar berlangsung. ¹⁰⁷ Di samping itu, tujuan pendidikan mencakup pada tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tujuan khusus).

Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada:

- a) Ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan termasuk di dalamnya pendidikan.
- b) Survei mengenai persepsi orang tua siswa/masyarakat tentang kebutuhan mereka, yang dikirimkan melalui angket atau wawancara dengan mereka.
- c) Survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu dihimpun melalui angket atau wawancara, observasi, dan dari berbagai media massa.
- d) Survei tentang man power.
- e) Pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama.
- f) Penelitian
- 2) Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan

-

¹⁰⁷ A. Hamid Syarif, *Pengenalan...*,76.

Isi pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah materi kurikulum yang disusun oleh seorang guru. ¹⁰⁸

Dalam undang-undang pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab IX pasal 39 telah ditetapkan bahwa:

Isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan nasional.¹⁰⁹

Sesuai dengan rumusan tersebut, isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran.
- b) Materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masingmasing satuan pelajaran. Perbedaan dalam ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut.
- c) Materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi yang hendak dicapai melalui penyampaian materi kurikulum.

-

¹⁰⁸ Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 25.

¹⁰⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Fokusmedia, 2003), 89.

Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan telah ditentukan para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal:¹¹⁰

- d) Perlu penjabaran tujuan pendidikan/pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan semakin sulit menciptakan pengalaman belajar.
- e) Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap dan keterampilan.
- f) Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis.

Ketiga ranah belajar, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Untuk hal tersebut diperlukan buku pedoman guru yang memberikan penjelasan tentang organisasi bahan dan alat pengajaran secara lebih mendetail.

- 3) Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹¹¹
 - a) Apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajar bahan pelajaran?

Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum*..., 153.Ibid, 153.

- b) Apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individu siswa?
- c) Apakah metode atau teknik tersebut memberikan uraian kegiatan yang bertingkat-tingkat?
- d) Apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik?
- e) Apakah metode atau teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya?
- f) Apakah metode atau teknik tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru?
- g) Apakah metode atau teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, juga mendorong penggunaan sumber yang ada di rumah dan di masyarakat?
- h) Untuk belajar keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan pada *learning by doing* (belajar sambil berbuat) di samping *learning by seeing and knowing* (belajar sambil melihat dan mengetahui).
- 4) Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran:¹¹²
 - a) Dalam penyusunan alat penilaian (tes) hendaknya diikuti langkahlangkah sebagai berikut: rumusan tujuan-tujuan pendidikan yang umum, dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Uraikan

٠

¹¹² *Ibid*, 154.

ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati. Hubungan dengan bahan pelajaran, tulislah butir-butir tersebut.

- b) Dalam merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan beberapa hal:
 - (1) Bagaimana kelas, usia dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites?
 - (2) Berapa lama waktu dibutuhkan untuk pelaksanaan tes?
 - (3) Apakah tes tersebut berbentuk uraian atau obyektif?
 - (4) Berapa banyak butir tes perlu disusun?
 - (5) Apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau oleh siswa?
- c) Dalam pengelolaan suatu penilaian hendaknya diperhatikan halhal sebagai berikut:
 - (1) Norma apa yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes?
 - (2) Apa digunakan formula question?
 - (3) Bagaimana pengelolaan skor ke dalam skor masak?
 - (4) Skor standar apa yang digunakan?
 - (5) Untuk apakah hasil tes digunakan?

4. Pendekatan Pengembangan Kurikulum

Pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik.¹¹³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹¹³ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*.(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 200.

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. 114

Di dalam teori kurikulum setidak-tidaknya terdapat empat pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu: pendekatan subjek akademis; pendekatan humanistis; pendekatan teknologis/kompetensi; dan pendekatan rekontruksi sosial.¹¹⁵

Ditinjau dari tipologi-tipologi filsafat pendidikan Islam sebagaimana uraian sebelumnya, maka tipologi perennial-esensialis salafi dan perennial-esensialis mazhabi lebih cenderung kepada pendekatan subjek akademis dan dalam beberapa hal juga pendekatan teknologis. Demikian pula, tipologi perennial-esensialis kontektual falsitikatif juga cenderung menggunakan pendekaran subjek akademis dan dalam beberapa hal lebih berorientasi pada pendekatan teknologis dan pendekatan humanistis. Tipologi modernis lebih berorientasi pada pendekatan humanistis. Sedangkan tipologi rekonstruksi sosial lebih berorientasi pada pendekatan rekonstruksi sosial.

¹¹⁴ Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)(Jakarta: Kencana, 2010), 77.

Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000) sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 139.

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010), 139-140.

a. Pendekatan Subjek Akademis

Kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang di intregasikan. Ciri-ciri ini berhubungan dengan maksud, metode, organisasi dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Para ahli akademis terus mencoba mengembangkan sebuah kurikulum yang akan melengkapi peserta didik untuk masuk ke dunia pengetahuan, dengan konsep dasar dan metode untuk mengamati, hubungan antara sesama, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran/mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik, yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu.

Pendidikan agama Islam di sekolah meliputi aspek al-Qur'an dan Hadis, keimanan, akhlak, ibadah dan muamalah, dan tarih (sejarah umat Islam). Di madrasah, aspek-aspek tersebut dijadikan sub-sub mata pelajaran PAI meliputi: al-Quran Hadis, Fiqih, Aqidah Akhlaq, dan sejarah. Kelemahan pendekatan ini adalah kegagalan dalam memberikan perhatian kepada yang lainnya, dan melihat bagaimana isi dan disiplin dapat membawa mereka pada permasalahan kehidupan modern yang kompleks, yang tidak dapat dijawab oleh hanya satu ilmu saja. 118

117 Ibid.

¹¹⁸ Ibid.

b. Pendekatan Humanistik

Pendekatan Humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide "memanusiakan manusia". Penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human, untuk memprtinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi dan dasar pengembangan program pendidikan. 119

Kurikulum Humanistis dikembangkan oleh para ahli pendidikan Humanistis. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi yaitu John Dewey. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Kurikulum Humanistis ini, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Oleh karena itu, peran guru yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif.
- 2) Menghormati individu peserta didik.
- 3) Tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat. 120

Dalam pendekatan Humanistis ini, peserta didik diajar untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Kurikulum ini melihat kegiatan sebagai sebuah manfaat untuk peserta dimasa depan. Sesuai dengan prinsip yang dianut, kurikulum ini menekankan integritas, yaitu kesatuan perilaku bukan saja yang bersifat intelektual tetapi juga emosional dan tindakan. Beberapa acuan dalam kurikulum ini antara lain:

¹¹⁹ Ibid. 142. ¹²⁰ Ibid.

- 1) Integrasi semua domain afeksi peserta didik, yaitu emosi, sikap, nilainilai, dan domain kognisi, yaitu kemampuan dan pengetahuan.
- 2) Kesadaran dan kepentingan.
- 3) Respon terhadap ukuran tertentu, seperti kedalaman suatu keterampilan.¹²¹ Kurikulum Humanistis memiliki kelemahan, antara lain:
- Keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individual peserta didik.
- Meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu tapi kenyataannya terdapat keseragaman peserta didik.
- Kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Dalam kurikulum ini prisip-prinsip psikologis yang ada kurang terhubungkan.¹²²

c. Pendekatan Rekrontruksi Sosial

Kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Kurikulum ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusian. Permasalahan yang muncul tidak harus pengetahuan sosial saja, tetapi di setiap disiplin ilmu termasuk ekonomi, kimia, matematika dan lain-lain. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama. Melalui interaksi ini siswa berusaha

¹²¹ Ibid

¹²² Ibid. 143.

memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyrakat yang lebih baik.¹²³

Kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum rekonstruksi sosial antara lain melibatkan:

- 1) Survey kritis terhadap suatu masyarakat.
- 2) Studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional.
- 3) Study pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal.
- 4) Uji coba kaitan praktik politik dengan perekonomian.
- 5) Berbagai pertimbangan perubahan politik.
- 6) Pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. 124

Pembelajaran yang dilakukan dalam kurikulum rekonstruksi sosial harus memenuhi tiga kriteria, yaitu: nyata, membutuhkan tindakan dan harus mengajarkan nilai. Evaluasi dalam kurikulum rekontruksi sosial mencakup spektrum luas, yaitu kemampuan peserta didik dalam menyampaikan permasalahan, kemungkinan pemecahan masalah, pendefinisian kembali pandangan mereka dan kemauan mengambil tindakan.¹²⁵

d. Pendekatan Berbasis Kompetensi

Kurikulum berbasis kompetisi (KBK) dapat diartikan sebagai suatu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga

1

¹²³ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000) sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, Ibid., 180.

¹²⁴ Ibid.
125 Ibid.

hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.

KBK memfokuskan pada perolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapainnya dapat dinikmati dalam bentuk perilaku atau ketrampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membentuk peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing.

KBK menurut guru yang berkualitas dan profesional untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun demikian konsep ini tentu saja tidak dapat digunakan sebagai resep untuk memecahkan semua masalah pendidikan, namun dapat memberi sumbangan yang cukup signifikan terhadap perbaikan pendidikan. 126

¹²⁶ Choirul Anam, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2009), 54.

Kurikulum adalah subsistem dalam dunia pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari proses dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi, Kurikulum Berbasis Kompentensi adalah kurikulum yang secara dominan menekankan pada kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam setiap mata pelajaran pada setiap jenjang sekolah. Sebagai implikasinya akan terjadi pergeseran dari dominasi penguasaan kongnitif menuju penguasaan kompetensi tertentu. Kompetensi yang dituntut terbagi atas tiga jenis, yaitu:

- 1) Kompetensi tamatan yaitu, kompetensi minimal yang harus dicapai oleh siswa setelah menamatkan sesuatu jenjang paendidikan tertentu.
- 2) Kompetensi mata pelajaran, yaitu kompetensi minimal yang harus dicapai pada saat siswa menyelesaikan mata pelajaran tertentu.
- Kompetensi dasar, yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap bahasan atau materi tertentu dalam satu bidang tertentu.

Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka inti yang memiliki empat komponen sebagai *framework* (kerangka kerja), yaitu:

 Kurikulum dan hasil belajar. Memuat perencanaan pembangunan kompetensi peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak lahir sampai 18 tahun dan juga memuat hasil belajar, indikator, dan materi.

- 2) Penilaian berbasis kelas. Memuat prinsip sasaran dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsistensebagai akuntabilitas public melalui identifikasi kompetensi dari indikator belajar yang telah dicapai, pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai serta peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan.
- 3) Kegiatan belajar mengajar. Memuat gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasan pedagogis dan adragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik.
- 4) Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar, pola ini dilengkapi dengan gagasan pembentukan kurrikulum (curriculum council), pengambangan perangkat kurikulum.¹²⁷

5. Komponen-Komponen Pengembangan Kurikulum

Dalam melakukan penyusunan kurikulum pendidikan, para pengembang kurikulum harus terlebih dahulu mengenal komponan, elemen atau unsurunsur kurikulum. Hal ini sangat penting sebagai pedoman pengaturan isi atau bahan pelajaran serta cara penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Siklus komponen ini bermula dari tujuan dan diharapkan muaranya mencapai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu dalam undang-undang sistem pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan

¹²⁷ Ibid., 58.

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peserta didik pada masa yang akan datang. Dengan demikian, mutu kualitas pendidikan perlu ditingkatkan agar lahir generasi berkualitas sebagai penerus pembangunan.

Seringkali uapaya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan tidak secara sistematis dan terarah, namun masih dilakukan secara tambal sulam dan kurang terencana atau terprogram. Hal ini tidak lain karena penanganannya dilakukan secara parsial pada subsistem tertentu, maka perlu pula dilakukan pembenahan pada subsistem lainnya, tetapi bila hal demikian tidak dilakukan, inovasi apapun yang akan dikembangkan pada lembaga tersebut, maka tigkat keberhasilannya relatif kurang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu harus dilakukan usaha dan cara-cara agar pembenahan dalam rangka pengembangan tersebut dapat berhasil dengan baik.

Pemahaman terhadap unsur-unsur atau elemen kurikulum unuk mencapai tujuan sebagaimana dipaparkan di atas, sedikitnya ada beberapa subsistem lain yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Bila subsistem-subsistem itu belum dipenuhi, maka tujuan yang telah ditetapkan relatif sulit untuk diwujudkan. Subsistem dimaksud adalah: input (intake) peserta didik, input instrumental (kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana dan manajemen), input *environmental* (lingkungan dan proses belajar mengajar. Semua itu merupakan alat yang saling mendukung dalam mewujudkan tujuan pendidikan.

Semua komponen yang saling berkaitan dan ditunjang oleh tanggung jawab (akuntabilitas) itu selanjutnya digunakan sebagai acuan dasar atau aturan bagi civitas akademika agar menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menghadapai ketatnya persaingan, sehingga pendidikan dapat dikembangkan sesuai dengan prinsip peningkatan kualitas secara berkelnajutan. Itu sebabnya keberhasilan pendidikan terefleksikan pada alumnusnya yang tersebar di berbagai segmen kehidupan. Ada yang menjadi abdi negara, ada yang berwiraswasta, dan ada pula yang "pengangguran". Fenomena pengangguran ini tentu saja sangat memprihatinkan. Sebagai alumni pendidikan tidak patut jika selalu mengharap uluran tangan orang lain dengan tamak. Kondisi seperti ini menunjukkan sikap mental alumni yang dewasa, tidak siap menerapkan ilmu yang dikaji, bahkan memperlihatkan keroposnya moral mereka. Mereka hanya berorientasi pada hal-hal formal dan seremonial, serta lebih memandang selembar ijazah ataupun gelar dan lebih mengejar jabatan pagawai negeri dari pada memikirkan hakikat dan kualitas jati diri mereka. Kondisi ini perlu dipikir dan dikritisi dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan terutama pada saat penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan kurikulum. Untuk lebih jelasnya keberadaan subsistem tersebut terlihat pada bagan berikut ini:



Gambar: 2.2. Peran berbagai Subsistem dalam Pengembangan Kurikulum

Beberapa subsistem tersebut memiliki peran penting dan strategis, karena kurikulum merupakan sumber tolok ukur dan kerangka acuan yang strategis bagi pencapaian tujuan pendidikan yang relevan dengan tuntutan pembangunan. ¹²⁸ Kurikulum adalah seperangkat rencana, pengaturan isi maupun bahan pelajaran dan cara penyampaina maupun penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di perguruan tinggi. Kurikulum di sekolah terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum lokal. ¹²⁹

Kurikulum nasional teridri atas kelompok pengembangan kepribadian berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bersama. Semua ciri ini merupakan persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi. Kurikulum nasional disebut juga dengan kurikulum inti. Oleh karena itu kurikulum inti mengandung arti bagian dari kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi.

1

¹²⁸ Soedjiarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasioanl* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), 10-13.

¹²⁹ Undang-undang sistem pendidikan Nasional, 35.

Kurikulum inti memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi.

Berkaitan dengan penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan kurikulum pendidikan dibutuhkan kehati-hatian, ketelitian dan perlu dipertimbangkan. Terutama dalam beberapa hal, yaitu tahap perkembangan peserta didik, kesesuain dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta kesesuaiannya dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian dalam penyusunan pengembangan kurikulum pendidikan terdapat tiga unsur yang perlu diwujudkan, yaitu: (1) kurikulum yang berlaku secara nasional (kurikulum nasional), (2) kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan (kurikulum muatan lokal), dan (3) kurikulum yang disesuaikan dengan ciri khas satuan pendidikan (kurikulum ciri khusus). 130

Kurikulum lokal yang memberikan warna khusus akan lebih dekat dengan alternatif pilihan pengembangan potensi dari peserta didik. Selain itu kurikulum jenis ini lebih konkrit dan lebih berfungsi dalam pengembangan sistem nilai di masyarakat. ¹³¹ Selanjutnya penyusunan pengembangan kurikulum pendidikan akan semakin kaya dan transparan apabila dalam sistem pendidikannya memberikan peluang dan kesempatan

¹³⁰ Herry Widiastono, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Balitbang Depdiknas, 1999), 70-71.

¹³¹ Tilaar, Mencari Paradigma Baru Perguruan Tinggi dalam Milenium III, dalam Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21 (Magelang: Tera Indonesia, 1999), 78.

yang seluas-luasnya bagi pengembangan potensi peserta didik yang *limitless* dari akal dan budinya. Pergeseran paradigma mengenahi potensi individu peserta didik dalam ineraksinya dengan masyarakat tentu berdampak pada cara-cara dalam penyusunan kurikulum. Dampak tersebut anata lain terkait dengan keadan lingkungan yang dapat diperkirakan denga memproyeksikan ekstrapolatif keadaan sekarang ke masa depan. Masa depan di sini bukan hanya satu dari pendidikan atau satu durasi program dari saat kurikulum diberlakukan. Penyusunan pengembangan kurikulum dilakukan sambil berjalan, sehingga dengan demikian kurikulum yang baik, diharapkan dapat bertahan sampai sepuluh tahun. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap komponen-komponen utama kurikulum.

Komponen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Memang sulit dibayangkan, bagaimana bentuk pelaksanan suatu pendidikan atau pengajaran di suatu sekolah yang tidak memiliki kurikulum. Setiap perbuatan pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuantujuan tertentu, apakah berkenaan dengan pembinaan pribadi, pembinaan kemampuan sosial, kemampuan untuk bekerja, atau pembinaan kemampuan lebih lanjut. Untuk pencapaian bahan-bahan pengajaran tersebut diperlukan cara atau metode penyampaian serta alat-alat tertentu pula. Ketiga hal di atas, yaitu tujuan, bahan ajar dan metode serta alat, merupakan komponen komponen utama dari kurikulum. 132

_

¹³² Robert S. Zais, *Curriculum: Principles and Foundations* (New York: Harper & Row Publisher, 1976), 346-350. Lihat juga Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, 3.

Komponen kurikulum pada dasarnya dibagi ke dalam: (1) tujuan; (2) Isi atau materi; (3) organisasi atau strategi; (4) media; dan (5) proses belajar mengajar. Akan tetapi ada pula yang membaginya menjadi: (1) tujuan; (2) isi dan struktur program; (3) organisasi dan strategi; (4) sarana; dan (5) evaluasi. Pandangan lain lagi berpendapat bahwa komponen kurikulum tersebut terdiri dari: (1) tujuan; (2) mata pelajaran; (3) metode dan organisasi; dan (4) evaluasi. Nasution membagi komponen atau unsur-unsur kurikulum menjadi: (1) tujuan; (2) bahan pelajaran; (3) proses belajar mengajar; dan (4) penilaian. Oi sisi lain para ahli kurikulum mengemukakan bahwa komponen dari anatomi kurikulum ada empat, yaitu: (1) tujuan; (2) isi atau materi; (3) proses atau sistem penyampaian; serta (4) evaluasi. Dari semua pandangan mengenai komponen kurikulum tersebut pada prinsipnya yang utama adalah tujuan, materi/pengalaman belajar, organisasi dan evaluasi.

a. Komponen Tujuan Kurikulum

Tujuan sebagai sebuah komponen kurikulum merupakan hal yang paling penting dalam proses pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai secara keseluruhan dalam proses pendidikan meliputi tiga domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Di samping itu, unsur tujuan juga merupakan kekuatan fundamental yang sangat peka, karena hasil kurikuler

12

¹³⁸ Ibid, 110.

¹³³ Subandiyah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 9.

¹³⁴ Soetopo dan W. Soewandi, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi dalam Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 26-28.

¹³⁵ Hilda Taba, Curriculum Development Theory and Practise (New York: Harcount Brace, Inc, 1972), 425.

¹³⁶ Nasution, Kurikulum dan Pengajaran (Jakarta: Bina Aksara, 1993), 4-7.

¹³⁷ Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum..., 295.

yang memberikan arah dan fokus seluruh program pendidikan. ¹³⁹ Dan pentingnya tujuan dalam proses pendidikan ini dikarenakan tidak ada satupun aspek-aspek pendidikan yang melupakan unsur tujuan. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Robert Zais, bahwa:

Pendidikan dalam setiap aspek-aspeknya selalu mempertanyakan tentag tujuan. Lebih lanjut, tujuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu tujuan umum (*aims*), tujuan instruksional umum (*goals*), dan tujuan instruksional khusus (*objective*),. Ketiga tujuan tersebut merupakan hirarki vertikal. 140

Bila dicermati lebih dalam, apa yang dinyatakan oleh Zais tersebut juga tersurat dalam tujuan kurikulum pendidikan di Indonesia. Pada lembaga pendidikan di Indonesia, hirarki vertikal tujuan kurikulum tersebut yang paling tinggi adalah tujuan pendidikan nasional. Kemudian tujuan kelembagaan, tujuan kurikuler dan tujuan pengajaran.

Tujuan pendidikan nasional merupakan kurikulum tertinggi yang bersumber pada falsafah bangsa Indonesia (Pancasila) dan kebutuhan masyarakat tertuang dalam GBHN dan Undang-unadang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Tujuan kelembagaan (tujuan institusional) merupakan tujuan yang menjabarkan tujuan pendidikan nasioal, bersumber pada tujuan tiap jenjang pendidikan dalam UUSPN, karakteristik lembaga, dan kebutuhan masyarakat. Tujuan kelembagaan bersumber pada kebutuhan masyarakat. Tujuan kelembagaan bersumber pada karakteristik mata pelajaran/bidang stud, karakteristik lembaga, dan kebutuhan masyarakat. Tujuan yang terbawah dari hirarki tujuan kurikulum pendidikan di

¹³⁹ Robert S. Zais, *Curriculum Prinsiples and Foundation*, dalam Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 297.

¹⁴⁰ Ibid, 207.

Indonesia adalah tujuan pengajaran, yakni suatu tujuan yang menjabarkan tujuan kurikuler dan bersumber pada karakteristik mata pelajaran/bidang studi dan karakteristik peserta didik.¹⁴¹

Dari sini tampak bahwa tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang paling tinggi dalam hirarki tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan institusional merupakan tujuan yang menjabarkan tujuan pendidikan nasional yang bersumber pada tujuan tiap jenjang pendidikan, karakteristik masing-masing lembaga pendidikan serta kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan kurikuler adalah tindak lanjut dari tujuan institusional, sehingga dalam melakukan kegiatan pendidikan dapat dipaparkan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan kegiatan pada suatu lembaga pendidikan, diharapkan isi pengajaran telah disusun dapat menunjang tercapainya tujuan. Suatu lembaga pendidikan memiliki kurikuler yang biasanya dapat dilihat dari Garis-garis Besar Program Pengajran (GBPP) dari suatu bidang studi. Dari GBPP tersebt terdapat suatu tujuan Kurikuler yang perlu dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya. 142

Kiranya perlu diperhatikan di sini, adalah tujuan kurikuler merupakan tindak lanjut dari tujuan pendidikan nasional. Sehingga terlihat hubungan hirarki dari ketiga tujuan pengajaran (instruksional), yakni suatu tujuan yang menjabarkan tujuan kurikuler dan bersumber pada karakteristik mata pelajaran/bidang studi. Tujuan ini bersifat operasional, dalam arti diharapkan dapat tercapai pada saat terjadinya proses belajar mengajar dan terjadi setiap kali dibahas dalam hal ini guru harus membuat satuan pelajaran (SP)/ RPP sekarang. Tujuan pengajaran ini terbagi menjadi dua

¹⁴¹ Dimyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran...*, 274.

¹⁴² Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 14.

macam, yakni tujuan umum pengajaran (TUP) dan tujuan khusus pengajaran (TKP), atau standar kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) atau di kurikulum 2013 ada yang disebut Kompetensi Inti (KI).

Bila dicermati maka tujuan tersebut juga terdapat hirarki vertikal dari yang tinggi ke yang rendah, dan sebaliknya. Pencapaian tujuan instruksional tresebut ditentukan oleh kondisi belajar mengajar yang ada, terutama kompetensi pendidik, fasilitas belajar, peserta didik, metode dan lingkungan.hirarki tujuan kurikulum secara vertikal tersebut dapat saja berimbang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Secara teknis Wilarjo memberikan penjelasan, bahwa dalam penyusunan penyempurnaan pengembangan kurikulum sebaiknya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Pengungkapan realita yang ada berupa sumberdaya maupun kendala yang dihadapi, (2) penetapan desiderata (ancas rampat dan tujuan khusus); (3) pemilihan dan penyusunan isi; (4) penyiratan dan penyuratan pola proses belajar mengajar, dan (5) penilaian hasil. Kelima langkah di atas ditentukan berdasarkan telaah logis dan ilmiah, bukan hasil rekayasa atau berusaha sebisanya secara apa adanya. Sedang realita dimaksud didasarkan pada hasil penelitian kelembagaan dan penilaian kebutuhan. Desideratnya merupakan perpaduan antara visi intuitif para ahli dan kejelian dalam membaca kecenderungan arah perubahan serta proyeksi ekstrapolatif secara grafis/sistematis dari keadaan dewasa ini ke masa depan. Demikian dari ketiga langkah lainnya, semuanya dijabarkan dari telaah rasional tentang faktor-faktor yang membentuk landasan kurikulum pendidikan. Faktor-faktor yang perlu ditelaah itu meliput hal-hal sebagai berikut: 1) isi disiplin ilmu, 2) peserta didik, 3) proses belajar, dan 4) tuntutan masyarakat. 143

¹⁴³ Udin Wiharjo, *Strategi Penyusunan Kurikulum dalam Membangun Daya Saing Bangsa Melalui Akulturasi Mutu Pendidikan Tinggi* (Malang: Merdeka University Press, 1998), 80.

Dari keempat faktor tersebut yang berkaitan dengan isi (content) disisplin ilmu mencerminkan ciri khas pendidikan. Dari setiap disiplin ilmu tersebutterjabar secara jelas sumbangan amung (unique contribution) suatu disiplin terhadap perkembangan nalar, perasaan dan sikap sosial. Tuntutan masyarakat tidak hanya dilihat pada keadaan sekarang, tetapi khususnya pada masa yang akan datang. Dengan langkah-langkah dan faktor-faktor tersebut dapat dihasilkan kurikulum yang berbeda-beda tergantung pada konsepsi dari penyususn kurikulum pendidikan. Adapun arah, warna dan tekanan dalam penyusunan, penyempurnaan perkembangan kurikulum pendidikan mencakup hal-hal sebagai berikut:

(1) Kurikulum disusun berdasar konsepsi humanistik dan mementingkan pengalaman yang secara pribadi memuaskan dan mengarah ke proses aktualisasi diri; (2) Konsep rekonstruksionis menghasilkan kurikulum yang mementingkan pendidikan sebagai kekuatan pengubah; (3) Kurikulum yang menganut konsep mengutamakan proses untuk menghasilkan apapun yang dianut oleh pembuat kebijakan.¹⁴⁴

Paparan di atas merupakan konsep yang harus dicermati, terutama bila dikaitkan dengan cepatnya peubahan ilmu dan teknologi, tuntutan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, dalam mempertahankan eksistensinya pendidikan harus lebih responsip terhadap perubahan dan kecenderungan yang sedang berlangsung. Untuk itu dalam konteks demikian dibutuhkan kemampuan yang meliputi:

McNeil menekankan konsepsi akademik yang memandang kurikulum sebagai wahana memperkenalkan mata pelajaran, disiplin dan bidang studi. Kurikulum didasarkan pada bangunan disiplin akademik dan ditentukan oleh pengertian yang paling pokok berupa asas tumpuan yang memberikan struktur kepada suatu disiplin ilmu. Lihat John D. McNeil, *Designig Curriculum*, dalam Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 24.

1) Kemampuan untuk mengetahui pola-pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan; 2) kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan-kecenderungan yang sedang berjalan; dan 3) kemampuan untuk menyusun program-program penyesuaian diri yang akan ditempunya dalam jangka waktu tertentu. 145

Dari sekian banyak aspek dalam penyusunan, penyempurnaan perkembangan kurikulum, maka pola perubahan yang berkembang dalam masyarakat harus tercermin dalam kurikulum lembaga pendidikan agar dapat memberikan jaminan kualitas pada lulusan yang dihasilkan. Sebagai titik tolak dalam mengkritisi penyusunan kurikulum, perlu ada perhatian terhadap beberapa hal yang harus dipakai sebagai landasan filosofis, antara lain:

kurikulum lembaga pendidikan harus merupakan kesinambung<mark>an</mark> ilmu dari satu tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi; kedua, semakin tinggi suatu tingkat pendidikan semakin sempit bidang keahliannya; ketiga, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin dalam bobot keilmuannya; keempat, kedalaman ilmu sebaiknya tidak diukur dengan jumlah kredit perkuliahan; kelima, strategi penyusunan kurikulum bukan berdasarkan pada adanya sumber daya manusia di sekitar. 146

b. Komponen Organisasi Kurikulum

Pengorganisasian kurikulum ini tidak mudah, karena berkaitan dengan aplikasi semua pengetahuan yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang bersentuhan dengan proses belajar mengajar. Menurut Taba, muatan kurikulum dan pengalaman belajar untuk disadari bahwa pengorganisasian diorganisasikan kurikulum

¹⁴⁵ Mochtar Bukhori, Pendidikan Dalam Pebangunan Moral (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana,

¹⁴⁶ S. Dardjowijoyo, Strategi Penyususnan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dalam Membangun Daya Saing Bangsa (Malang: Universitas Merdeka Press, 1998), 84.

merupakan kegiatan yang sulit dan komplek. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sumantri, bahwa kegiatan pengorganisasian kurikulum sangat sukar dan komplek, sebab berhubungan dengan pengetrapan semua pengetahuan yang bersentuhan dengan perkembangan peserta didik dan proses belajar mengajar. Kesulitan tersebut lantaran berhubungan dengan implementasi secara konsisten, hati-hati dan penuh pertimbangan. Organisasi kurikulum mengandung dua dimensi, yaitu organisasi materi kurikulum dan organisasi pengalaman belajar. Kedua dimensi tersebut seringkali membingungkan karena batasan-batasannya kurang jelas. 147

Sementara itu, muatan umum dalam kurikulum harus disesuaikan dengan jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar organisasi kurikulum seperti paparan Ahmad dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: sturktur horizontal dan struktur vertikal, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Struktur horizontal berhubungan dengan masalah pengorganisasian kurikulum dalam bentuk penyusunan bahan-bahan pengajaran yang akan disampaikan. Bentuk penyusunan mata pelajaran itu dapat secara terpisah atau penyatuan seluruh pelajaran. Tercakup pula di sini adalah jenis-jenis program yang dikembangkan di sekolah.
- b. Struktur vertikal berhubungan dengan masalah pelaksanaan kurikulum di sekolah. Apakah kurikulum tersebut dilaksanakan dengan sistem kelas, tanpa kelas atau gabungan keduanya dengan sistem unit atau

¹⁴⁷ Mulyani Sumantri, *Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum yang Menjamin Tercapainya Lulusan yang Kreatif, dalam Kurikulum Untuk Abad ke 21* (Jakarta: PT. Grasindo, 1998), 23.

semester, juga pembagian waktu tiap jenjang. 148

Dengan demikian, dalam pengorganisasian materi kurikulum dan pengalaman belajar dianjurkan fakta-fakta dan mempertimbangkan pengalaman praktis sehingga memiliki arti penting bagi para lulusan lembaga pendidikan tersebut nantinya. Hal ini menurut Winccoff, dikarenakan kurikulum sebagai petunjuk dirancang secara khusus untuk pencapaian tujuan pendidikan dan sebagai pedoman dalam pembelajaran maupun evaluasi. 149

c. Komponen Materi/Program Kurikulum

Materi merupakan fungsi khusus dari kurikulum pendidikan formal. 150 Upaya memilih dan menyusun materi kurikulum diperlukan agar pengetahuan yang diinginkan pada jalurnya dapat disajikan secara efektif. Untuk memudahkan ke arah tersebut perlu adanya klasifikasi ilmu dalam pendidikan. Bagaimana memilih materi atau isi untuk mencapai tujuan pendidikan, maka materi tersebut harus mampu menyentuh seluruh kepentingan, dimensi, visi, dan potensi peserta didik secara utuh dan bersifat unversal. Wacana ini memberikan isyarat, bahwa materi kurikulum yang ditawarkan, memandang muatan materi yang

¹⁴⁸ M. Ahmad, dkk, Pengembangan Kurikulum untuk IAIN dan PTAIS Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKDK (Bandung: Pustaka Sari, 1998), 105.

149 Larry Wincroff, Curriculum Development and Intructional Planning (Jakarta: Depdikbud,

¹⁹⁸⁹⁾ dalam M. Ahmad dkk., Pengembangan Kurikulum..., 40.

¹⁵⁰ Dimyati mengungkapkan bahwa kurikulum bukan hanya terdiri dari sekumpulan pengetahuan atau informasi, tetapi harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih yang bermakn dalam pengetahuan itu sendiri maupun bagi peserta didik dan lingkungannya. Dengan bertolak dari kurikulum sebagai arah kegiatan pembelajaran di lembaga sekolah, maka ia harus memiliki komponen. Komponen ini memungkinkan karena adanya perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. M. Dimyati, Pengorganisasian Bahan Ajar dalam RangkaPengembangan Kurikulum Konstruksi. Readers dan Masalahnya (Malang: FKIP, 1993), 2.

dikandungnya harus merupakan jaringan yang senantiasa berhubungan antara satu dengan yang lain secara utuh dan saling ketergantungan. Dalam konteks ini terlihat bahwa dalam pendidikan tidak mengenal adanya dualisme parsial dalam kandungan kurikulum, sebagaimana yang diketengahkan pendidikan kontemporer dewasa ini. 151

Begitu pula dalam pemilihan dan penyusunan materi kurikulum dibutuhkan kehati-hatian karena menyangkut tujuan mengajar yang telah ditentukan. Fungsi tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai orientasi dalam tugas kegiatan belajar mengajar. Pentingnya pemahaman konsep tentang materi (muatan) kurikulum, diungkapkan oleh Alexander sebagai berikut:

.....yaitu berupa fakta-fakta, pengamatan-pengamatan, data, persepsi, kecerdasan, daya perasa, rancangan dan kesimpulan diambil dari apa yang telah dipahami oleh pikiran manusia dari pengalaman yang membentuk pikiran yang mengorganisir dan mengatur kembali produk-produk dari pengalaman ke dalam pengetahuan tentang adat istiadat lama, ide-ide, konsep-konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, perencanaan dan kesimpulan.

Dalam penyempurnaan materi (muatan) kurikulum yang dirumuskan dan ditetapkan secara seragam di seluruh lembaga pendidikan, bukan hanya untuk pengaturan institusionalnya, tetapi juga kurikulum dan materi pengajarannya diseragamkan secara nasional. Banyak para penyusun dan pengembang kurikulum memasukkan unsur-unsur berikur sebagai muatan kurikulum. Seperti halnya pandangan berikut yang mendefinisikan muatan/materi kurikulum sebagai berikut:

Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan (Jakarta:PT. Bina Aksara, 1995), 11-15.
 Alexander dan J. A. Lewis, Curriculum Planning For Better Teaching and Learning, dalam M.

¹⁵² Alexander dan J. A. Lewis, *Curriculum Planning For Better Teaching and Learning*, dalam M. Dimyati, *Pengorganisasian Bahan Ajar*, 160.

Pengetahuan (berupa fakta-fakta, penjelasan-penjelasan, prinsip-prinsip, definisi), keterampilan dan proses (membaca, menulis, berpikir secara kritis, pembuatan keputusan, mengadakan komunikasi) dan nilai-nilai (yakni kepercayaan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan baik-buruk, salah dan benar, cantik dan jelek). ¹⁵³

Dari paparan tersebut, muatan kurikulum tidak terlepas dari tiga unsur yang diidentifikasi di atas, meskipun unsur-unsur tersebut kenyataannya dapat dipisah-pisahkan. Untuk itu, materi kurikulum yang ditawarkan harus senantiasa ditinjau dan diformulasikan seirama dengan perkembangan kepentingan manusia dalam menghadapi zamannya, sehingga orientasi kurikulum yang ditawarkan harus senantiasa berorientasi ke masa depan secara dialogis, bukan kepentingan sesaat yang bersifat kaku, 154 kurikulum yang ber<mark>la</mark>ku selalu te<mark>rdi</mark>ri dari pengetahuan, proses dan nilai dan harus bersifat adaptif-dialogis, sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan perubahan zaman yang semakin maju dan komplek. 155 Dengan demikian, pengembang kurikulum secara sadar harus bertanggungjawab dan memperhitungkan masing-masing unsur ini dalam penyusunan perkembangan kurikulum. Dalam kegiatan tersebut, sebenarnya tidak cukup hanya materi bahan ajar saja yang dipikirkan. Lebih dari itu, adalah pengalaman belajar yang mampu mendukung pencapaian tujuan secara lebih efektif. Hal ini ada kaitannya dengan paparan berikut yang memandang kurikulum sebagai suatu rencana belajar dan tujuan

_

¹⁵³ Ronaid T. Hyman, *Approaches in Curriculum. Englewood Clint* (New York: Prentice-Hall, 1973), dalam M. Dimyati, *Pengorganisasian Bahan Ajar*, 4.

¹⁵⁴ Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) 177.

¹⁵⁵ Khurshid Ahmad, (ed), *Islam Its Meaning and Message* (London: Islamic Council of Europe, 1976), dalam Samsul Nizar. *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran*, 103.

menentukan materi pelajaran yang signifikan. Dengan kata lain, kurikulum secara pasti mencakup seleksi, organisasi materi dan pengalaman belajar. ¹⁵⁶

Materi kurikulum sebetulnya mencakup semua pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang terorganisasi dalam mata pelajaran. Pemilihan dan penyeleksian materi kurikulum dan pengalaman belajar dapat diikuti dari paparan para ahli kurikulum, diantaranya sebagai berikut:

Pemilihan materi suatu kurikulum dengan menyertakan pengalaman belajar merupakan salah satu dari sekian kebijakan yang dilakukan dalam upaya penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan kurikulum. Sekaligus merupakan cara yang logis, masuk akal dan amat penting. ¹⁵⁷

Penentuan dan pemilihan materi/isi kurikulum dalam hal ini pemerintah sangat berkepentingan untuk menetapkan "standar institusional" yang sama di semua lembaga pendidikan. Di samping itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengembangan kurikulum, antara lain kualifikasi tenaga pengajar, perpustakaan yang masih belum memadai, sarana dan prasarana yang jauh dari mencukupi dan belum tersedianya jurnal dari dalam maupun luar negeri berkaitan dengan suatu disiplin ilmu. Dengan demikian, dalam perubahan perkembangan kurikulum masih diperlukan pemaknaan yang dalam terhadap proses pembelajaran. Pemaknaan itu diperlukan karena adanya hubungan di antara komponen-komponen dalam kurikulum. Untuk itu, bahan-bahan kajian dalam perencanaan pengembangan kurikulum tidak dapat dipisahkan dari komponen dan materi/pengalaman belaar, berdasarkan teori yang dominan

¹⁵⁶ Hida Taba, *Curriculum Development, Theory and Practice* (New York: Harcourt, Brace Jovanovich, Inc., 1962), 266.

¹⁵⁷ Ibid. 263.

dalam pendidikan. Bahkan, pendidikan itu memiliki hubungan yang erat terhadap lajunya perekonomian dan kesejahteraan umat manusia. Kondisi ini akan terwujud bila politik suatu negara menunjang bagi tumbuhnya sebuah sistem pendidikan yang dinamis. Dengan kesejahteraan tersebut, maka pendidikan dapat lebih terkonsentrasi pada tugasnya. Melalui kebijakan yang demikian, dapat mempercepat proses penerapan tujuan pendidikan yang dicapai.

d. Komponen Media atau Sarana dan Prasarana

Media merupakan sarana prasarana dalam pengajaran. Sarana dan prasarana atau media, merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam menerapkan materi atau muatan kurikulum, sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Pemakaian media dalam proses belajar mengajar perlu dilaksanakan oleh pendidik agar apa yang disampaikannya dapat memiliki makna dan arti penting bagi peserta didik.

Ketepatan memilih alat media, menurut Subandiyah, ¹⁵⁹ merupakan tuntutan bagi seorang pendidik agar proses belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan pengajaran atau pendidikan dapat tercapai dengan baik. Di samping itu, penetapan media dan sarana-prasarana penilaian itu harus didasarkan pada kesesuaian bahan dengan tujuan dan kesesuaian bahan dengan landasan psikologis belajar maupun perkembangan peserta didik. Kurikulum merupakan kesatuan perbagai

159 Subandiyah, *Pengembangan dan Inovasi kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 5.

¹⁵⁸ JOHN Vaizey, *Pendidikan di Dunia Modern, Terj. L.P. Miirtmi* (Jakarta: Gunung Mulia, 1982), 146-147.

komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi. Karenanya tidak dapat dilakukan penilaian hanya terhadap salah satu bagian dari komponen kurikulum. Hasil interaksi antar komponen kurikulum tersebut tampak pada terjadinya perubahan tingkah laku dan sikap peserta didik.

e. Komponen Strategi Belajar Mengajar

Dalam proses belajar mengajar, pendidik perlu mengetahui dan memahami strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar mengarah pada suatu pendekatan (approach) dan metode (method). Strategi dalam belajar mengajar dapat dipahami sebagai cara yang dimiliki oleh pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dengan demikian, komponen strategi belajar mengajar ini memiliki makna penting dan mesti dipahami secara komprehensif dan diupayakan aplikasinya oleh guru sejak dari mempersiapkan pengajaran hingga proses evaluasi. Dengan menggunakan strategi yang tepat, hasil proses belajar mengajar dapat memuaskan guru maupun peserta didik. Namun, perlu segera dicatat bahwa penggunaan strategi yang tepat dan akurat mensyaratkan kompetensi yang sangat tinggi dari pendidik. 160

Komponen strategi ini juga menunjuk pada peralatan mengajar dan mengarah pada pendekatan belajar mengajar. Pada hakikatnya, strategi belajar mengajar tidak terbatas pada pendekatan, metode dan peralatan. Akan tetapi lebih dari itu strategi belajar juga tergambar dari cara melaksanakan pengajaran, penilaian, bimbingan dan mengatur kegiatan

¹⁶⁰ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum*, *Teori dan Praktik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 15.

secara umum maupun khusus dalam kgiatan belajar mengajar. ¹⁶¹ Dari sini tampak bahwa strategi belajar mengajar, mengatur seluruh komponen, mencakup cara yang berlaku umum maupun dalam menyajikan setiap bidang studi. Oleh sebab itu komponen strategi ini dalam pelaksanaan kurikulum tergambar dari cara melaksanakan kegiatan belajar mengajar, menggunakan penilaian, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta cara mengatur kegiatan lembaga secara keseluruhan. Dalam hal ini Soetopo menegaskan bahwa:

Komponen ini erat kaitannya dengan metode atau upaya apa saja yang dipakai agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Dalam hal ini tentu saja dipakai agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Dalam hal ini tentu saja methode yang dipergunakan sebaiknya relevan terhadap tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan menimbang kemampuan guru, lingkungan, peserta didik serta sarana pendidikan yang ada. Dalam pelaksanaannya tidak ada satu yang baik untuk segala tujuan dan situasi, karena suatu metode itu cocok untuk mencapai suatu tujuan dan situasi, karena suatu metode itu cocok untuk mencapai suatu tujuan tetapi belum tentu cocok untuk tujuan yang lain. ¹⁶²

f. Komponen Evaluasi

Evaluasi merupakan komponen kurikulum dan mungkin merupakan aspek kegiatan pendidikan yang dipandang paling kecil. ¹⁶³ Menurut

161 Subandiyah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, 6.

¹⁶³ Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, 369.

¹⁶² S. Soetopo dan W. Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1986), 36.

Sumantri, 164 evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui, menelusuri atau menjajagi keadaan dan kemajuan peserta didik, praktik, materi dan program pendidikan. Evaluasi merupakan titik awal dan titik akhir atau alat dalam pemantauan terhadap kesinambungan dan pembaharuan pendidikan. Tujuan evaluasi dapat terbatas dan sempit, dalam arti hanya memberi penilaian terhadap peserta didik baik yang berkaitan dengan hasil belajar maupun yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar. Akan tetapi, dapat juga dalam arti luas, yakni perbaikan program kurikulum dan pembelajaran. Dalam hal ini, Murry Print menyatakan:

Evaluasi yang berkaitan dengan peserta didik adalah suatu evaluasi tentang kinerja peserta didik dalam suatu konteks khusus. Evaluasi seperti ini pada dasarnya berusaha menentukan seberapa bagus peserta didik telah mencapai tujuan-tujuan instruksional khusus yang telah ditetapkan terutama tentang situasi belajar. Buku hasil belajar (*raport*) contoh dari evaluasi produk. Sedang evaluasi yang berkaitan dengan kegiatan proses adalah menguji pengalaman-pengalaman dan kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalam situasi belajar. Dalam sebagian besar, hal evaluasi proses digunakan tatkala membuat pertimbangan-pertimbangan tentang interaksi-interaksi sekolah dan ineraksi-ineraksi kelas. Misalnya, interaksi peserta didik-guru, metode-metode instruksional, tindakan-tindakan guru dan sebagainya. 165

Dua sub katgori tentang evaluasi proses seringkali mengacu pada (literatur). Evaluasi kurikulum merupakan istilah yang relatif baru. Penggunaan evaluasi proses pada konteks kurikulum sedikit berbeda dengan tugas evaluasi pada umumnya. Oleh karena itu, Davis mengungkapkan bahwa pada prinsipnya evaluasi kurikulum tidak lain

¹⁶⁴ Mulyani Sumantri, *Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum yang Menjamin Tercapainya Lulusan yang Kreatif, dala Kurikulum untuk Abad ke 21* (Jakarta: Grasindo, 1994), 11.

¹⁶⁵ Murry Print, Curriculum Development and Design, dalam Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum, 142.

adalah proses merencanakan, memperoleh dan memori informasi atau keterangan yang bermanfaat untuk membuat keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan di seputar kurikulum. ¹⁶⁶ Untuk memahami evaluasi kurikulum, J.M. Marse menjelaskan bahwa:

Evaluasi kurikulum berbda dengan jenis-jenis evaluasi pendidikan lainnya yang di dalamnya memfokuskan pada bagaimana guru-guru dan peserta didik berinteraksi di sekitar kurikulum atau silabus khusus. Evaluasi kurikulum mencakup suatu pengujian tentang tujuan-tujuan umum rasional dan struktur tentang kurikulum atau suatu kajian tentang konteks di mana interaksi-interaksi dengan para eserta didik terjad (termasuk masukan-masukan dan para orang tua peserta didik dan masyarakat), dan suatu analisis tentang minat, motiva dan kemampuan dari peserta para peserta didik yang mempunyai pengalaman tentang suatu kurikulum khusus. 167

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan evaluasi di sini, menurut Muhammad Ali adalah:

Evaluasi terhadap kurikulum bukan semata-mata dilakukan terhadap salah satu komponen atau elemen saja, melainkan seluruh komponen atau elemen, baik tujuan, bahan/muatan, organisasi kurikulum, metode maupun proses evaluasi itu sendiri. 168

Dengan demikian, evaluasi kurikulum dilakukan secara keseluruhan terhadap komponen atau elemen, sebab kurikulum itu sendiri merupakan kesatuan berbagai komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi. Oleh karenanya, evaluasinya tidak dapat dilakukan pada satu bagiannya saja. Dengan evaluasi kurikulum yang dilakukan tersebut, secara garis besar sasarannya dapat dilakukan kepada evaluasi proses dari hasil kurikulum. Tujuannya adalah sebagaimana terungkap dalam paparan berikut ini:

_

¹⁶⁶ Davis Warwick, Curriculum Struscture and Design dalam Mulyani Sumantri, Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum, 49.

¹⁶⁷ John, M. Marse, *Critical Issues in Qualitative Research Methods*, Soetopo dan W. Soemanto, *Pembinaan Pengembangan Kurikulum*, 137.

¹⁶⁸ Muhammad Ali, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 124.

Evaluasi terhadap proses kurikulum bertujuan menalai sampai sejauh mana kurikulum dapat memberikan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi terhadap hasil bertujuan untuk menilai apakah hasil belajar dicapai peserta didik sesuai dengan tujuan. Evaluasi proses, lebih cenderung dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penelitian. Jenis penelitian yang dapat diterapkan adalah *action research* dan *evaluation research*. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari balikan dari suatu proses kurikulum.¹⁶⁹

Dari paparan tersebut terlihat ada suatu fungsi yang perlu dipahami oleh pendidik sebagai pengembang kurikulum. Tidak ada pilihan lain, kecuali untuk memberikan pedoman dan arahan mengevaluasi kurikulum atau untuk penyusunan dan pengembangannya.

6. Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum

Perkembangan kurikulum secara menyeluruh tidak mungkin dipisahkan dari perkembangan sistem pendidikan dalam urutan waktu. Dari berbagai studi dalam pengembangan kurikulum, akhirnya dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum juga tidak mungkin dipisahkan dari perkembangan komponen-komponen yang mendasari perencanaan dan pengembangan kurikulum. Komponen-komponen itu adalah:

- a. Perkembangan tujuan kurikulum.
- b. Perkembangan materi (bahan) kurikulum.
- c. Perkembangan alat dan media pendidikan dalam proses belajar mengajar.
- d. Perkembangan organisasi kurikulum.
- e. Perkembangan evaluasi kurikulum sekolah.

Komponen-komponen di atas, baik secara sendiri maupun secara bersamasama menjadi dasar utama dalam mengembangkan sistem pembelajaran.

¹⁶⁹ Ibid, 126.

7. Mekanisme Pengembangan Kurikulum

Mekanisme pengembangan kurikulum harus melalui beberapa tahapan. Beberapa tahapan itu antara lain sebagai berikut:¹⁷⁰

a. Tahap 1: Studi kelayakan dan kebutuhan

Pengembangan kurikulum melakukan kegiatan analisis kebutuhan program dan merumuskan dasar-dasar pertimbangan bagi pengembangan kurikulum tersebut. Untuk itu si pengembang perlu melakukan studi dokumentasi dan studi lapangan.

- b. Tahap 2: Penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum Konsep awal ini dirumuskan berdasarkan rumusan kemampuan, selanjutnya merumuskan tujuan, isi, strategi pembelajaran sesuai dengan pola kurikulum sistematik.
- c. Tahap 3: Pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum Penyusunan rencana ini mencakup penyusunan silabus, pengembangan bahan pelajaran dan sumber-sumber material lainnya.
- d. Tahap 4: Pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan Pengujian kurikulum di lapangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kehandalannya, kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilannya, hambatan dan masalah-masalah yang timbul dan faktor-faktor pendukung yang tersedia, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum.
- e. Tahap 5: Pelaksanaan kurikulum

 Ada dua kegiatan yang perlu dilakukan, ialah:

¹⁷⁰ Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 142.

- Kegiatan desiminasi, yakni pelaksanaan kurikulum dalam lingkup sampel yang lebih luas.
- 2) Pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh yang mencakup semua satuan pendidikan pada jenjang yang sama.
- f. Tahap 6: Pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum Selama pelaksanaan kurikulum perlu dilakukan penilaian dan pemantauan yang berkenaan dengan desain kurikulum dan hasil pelaksanaan kurikulum serta dampaknya.
- g. Tahap 7: Pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian

Berdasarkan penilaian dan pemantauan kurikulum diperoleh data dan informasi yang akurat, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan pada kurikulum tersebut bila diperlukan, atau melakukan penyesuiaian kurikulum dengan keadaan. Perbaikan dilakukan terhadap beberapa aspek dalam kurikulum tersebut.

Prosedur pengembangan kurikulum tidaklah sesederhana sebagaimana yang kita bayangkan selama ini dan dilakukan oleh pengembang kurikulum amatir. Pengembangan kurikulum ternyata mempunyai rambu-rambu yang harus dipatuhi dengan seksama. Jika tidak mengikuti aturan atau prosedur yang ditetapkan akan mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan yang berakibat kualitas pendidikan tidak mencapai hasil maksimal.

Dalam prosedur pengembangan kurikulum dapat diidentifikasi tiga tahapan, yakni tahapan merencanakan, melaksanakan, dan menilai. Pelaksanaan kurikulum tidak boleh berjalan tanpa kontrol, untuk itu

pengontrolan harus dilakukan dengan seksama. Pelaksanaan kurikulum yang lepas kontrol akan mengakibatkan tidak berjalannya kurikulum yang dibuat dengan semestinya.

Pengembangan kurikulum mempunyai mekanisme, yaitu berupa tahapan-tahapan dari mulai studi pendahuluan hingga akhirnya penilaian tentang keberhasilan kurikulum maupun perbaikan-perbaikan atau penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam prosedur pengembangan kurikulum. Satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung. Jika ada faktor tertentu yang tidak disertakan maka jalannya pelaksanaan kurikulum akan terganggu.

8. Model Pengembangan Kurikulum

Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan, dalam proses pembimbingan perkembangan siswa, mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga maupun masyarakat.

Kegiatan pengembangan kurikulum sekolah memerlukan suatu model yang dijadikan landasan teoretis untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Model atau konstruksi merupakan alasan teoretis tentang suatu konsepsi dasar. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum model merupakan ulasan teoretis tentang proses pengembangan kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula hanya merupakan ulasan tentang salah satu komponen kurikulum. Ada suatu model yang memberikan ulasan tentang keseluruhan proses

kurikulum, tetapi ada pula yang hanya menekankan pada mekanisme pengembangan saja, dan itu pun hanya berupa uraian tentang pengembangan organisasinya.

Banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan mana yang digunakan. Model pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan dan pengelolaan yang sifatnya sentralisasi berbeda dengan yang desentralisasi. Model pengembangan dalam kurikulum yang sifatnya subyek akademis berbeda dengan kurikulum humanistik, teknologis dan rekonstruksi sosial. ¹⁷¹

Model yang digunakan dalam proses pengembangan kurikulum dapat dikemukakan oleh para ahli pendidikan mulai dari suatu model yang sederhana sampai dengan model yang paling sempurna di antaranya adalah:

a. Model Pengembangan Kurikulum Administratif

Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau *line staff* karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi.

Dengan wewenang administrasinya, administrator pendidikan (apakah dirjen, direktur atau kepala kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan) membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum.

¹⁷¹ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum*..., 161.

Model administratif sering pula disebut sebagai model garis dan staf atau dikatakan pula sebagai model dari atas ke bawah. Kegiatan pengembangan kurikulum dimulai dari pejabat pendidikan yang berwenang membentuk panitia pengarah, yang biasanya terdiri dari pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar. Panitia pengarah tersebut diberi tugas untuk merencanakan, memberikan pengarahan tentang garis besar kebijaksanaan, menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan.

Setelah kegiatan tersebut selesai, kemudian panitia menunjuk atau membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan keperluan yang para anggotanya biasanya terdiri dari staf pengajar dan spesialisasi kurikulum. Kelompok-kelompok kerja tersebut bertugas untuk menyusun tujuan-tujuan khusus pendidikan, garis besar pengajaran, dan kegiatan belajar. Hasil kerja kelompok tersebut direvisi oleh panitia pengarah dan kemudian dilakukan uji coba jika dipandang perlu, walau hal ini jarang dilakukan.

Dilakukan uji coba untuk mengetahui efektivitas dan kelayakan pelaksanaannya. Pelaksana uji coba rancangan kurikulum tersebut adalah sebuah komisi yang ditunjuk oleh para panitia pengarah yang para anggotanya sebagian besar terdiri dari pihak sekolah. Setelah penelitian uji coba selesai, panitia pengarah menelaah atau mengevaluasi sekali lagi rancangan kurikulum tersebut, baru kemudian memutuskan pelaksanaannya.

Pengembangan kurikulum model administratif tersebut menekankan kegiatannya pada orang-orang yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Berhubung pengarah kegiatan berasal dari atas

ke bawah, pada dasarnya model ini mudah dilaksanakan pada negara yang menganut sistem sentralisasi dan negara yang kemampuan profesional tenaga pengajarnya masih rendah. Kelemahan model ini terletak pada kurang pekanya terhadap adanya perubahan masyarakat, di samping itu juga karena kurikulum ini biasanya bersifat seragam secara nasional. Sehingga kadang-kadang melupakan atau mengabaikan adanya kebutuhan dan kekhususan yang ada pada tiap daerah. 172

Dalam pelaksanaan kurikulum tersebut, selama tahun-tahun permulaan diperlukan pula adanya kegiatan monitoring, pengamatan dan pengawasan serta bimbingan dalam pelaksanaannya. Setelah berjalan beberapa saat perlu juga diadakan suatu evaluasi, untuk menilai baik validitas komponenkomponennya, prosedur pelaksanaan maupun keberhasilannya. Penilaian menyeluruh dapat dilakukan oleh tim khusus sekolah yang bersangkutan. Hasil penilaian tersebut merupakan umpan balik, baik instansi pendidikan tingkat pusat, daerah, maupun sekolah.

b. Model Pengembangan Kurikulum dari Bawah (Grass Roots)

Model pengembangan kurikulum ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas, tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau komponen sekolah.

Jika pada model administratif kegiatan pengembangan kurikulum berasal dari atas, model yang kedua ini inisiatifnya justeru berasal dari bawah, yaitu dari pengajar yang merupakan para pelaksana kurikulum di

¹⁷² Burhan Nurgiyanto, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Yogyakarta: BPFEE, 1988), 169.

sekolah-sekolah. Model ini berdasarkan pada anggapan bahwa penerapan suatu kurikulum akan lebih efektif jika para pelaksananya di sekolah sudah diikutsertakan sejak semula kegiatan pengembangan kurikulum itu. ¹⁷³

Pengembangan kurikulum dari bawah ini menuntut adanya kerja antarguru, antarsekolah secara baik, di samping harus ada juga kerjasama dengan pihak luar sekolah, khususnya orang tua murid dan masyarakat. Pada pelaksanaannya para administrator cukup memberikan bimbingan dan dorongan kepada para staf pengajar. Setelah menyelesaikan tahap tertentu, biasanya diadakan lokakarnya untuk membahas hasil yang telah dicapai, dan sebaliknya merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Pengikut lokakarya di samping para pengajar dan kepala sekolah, juga melibatkan orang tua dan anggota masyarakat, serta para konsultan dan para nara sumber lain.

Dalam pengembangan kurikulum yang bersifat *grass roots* seorang guru, sekelompok guru atau keseluruhan guru suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Pengembangan atau penyempurnaan ini dapat berkenaan dengan suatu komponen kurikulum, satu atau beberapa bidang studi ataupun seluruh bidang studi dan seluruh komponen kurikulum.

Apabila kondisinya telah memungkinkan, baik dilihat dari kemampuan guru-guru, fasilitas, biaya maupun bahan-bahan kepustakaan, pengembangan kurikulum model *grass roots* akan lebih baik. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan juga

¹⁷³ Ibid, 169.

penyempurna dari pengajaran di kelasnya. Dialah yang paling tahu kebutuhan kelasnya, oleh karena itu dialah yang paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya. 174

Pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum model ini adalah pengembangan kurikulum secara demokratis, yaitu yang berasal dari bawah. Keuntungan model ini adalah proses pengambilan keputusan terletak pada para pelaksana, mengikutsertakan berbagai pihak bawah khususnya para staf pengajar karena mereka yang tahu terhadap kondisi lapangan dan kemampuan siswa serta keinginan para orang tua murid di lingkungan sekolah tersebut.

c. Model Pengembangan Kurikulum Hilda Taba

Model pengembangan kurikulum yang ditemukan oleh Hilda Taba ini berbeda dengan cara yang lazim, yakni yang bersifat deduktif karena caranya bersifat induktif. Itulah sebabnya model ini disebut model terbalik. Pengembangan kurikulum model ini diawali dengan melakukan percobaan, penyusunan teori dan kemudian penerapannya, hal itu dimaksudkan untuk mempertemukan antara teori dan praktik serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan pada kurikulum yang terjadi tanpa percobaan. 175

Ada lima langkah pengembangan kurikulum model Taba ini: 176

Langkah pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama guruguru. Di dalam unit eksperimen ini diadakan studi yang seksama tentang

¹⁷⁴ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, 163.

¹⁷⁵ Ahmad, dkk., *Pengembangan Kurikulum...*, 57.

¹⁷⁶ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum*..., 166.

hubungan antara teori dengan praktik. Perencanaan didasarkan atas teori yang kuat, dan pelaksanaan eksperimen di dalam kelas menghasilkan data-data untuk menguji landasan teori yang digunakan. Ada delapan langkah dalam kegiatan unit eksperimen ini:

- 1) Mendignosis kebutuhan;
- 2) Merumuskan tujuan-tujuan khusus;
- 3) Memilih isi;
- 4) Mengorganisasi isi;
- 5) Memilih pengalaman belajar;
- 6) Mengorganisasi pengalaman belajar;
- 7) Mengevaluasi;
- 8) Melihat konsekuensi dan keseimbangan.

Langkah kedua, menguji unit eksperimen. Meskipun unit eksperimen ini telah diuji dalam pelaksanaan di kelas eksperimen, tetapi masih harus diuji di kelas-kelas atau tempat lain untuk mengetahui validitas dan kepraktisannya, serta menghimpun data bagi penyempurnaan. Inti dari langkah kedua ini adalah menguji-cobakan kurikulum yang sudah dikembangkan untuk mengetahui kesahihan dan kelayakan dalam proses belajar mengajar, sehingga menuntut para pengembang untuk menganalisis dan merevisi hasil uji coba serta kemudian mensosialisasikannya.

Langkah ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Dari langkah pengujian diperoleh beberapa data, data tersebut digunakan untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan. Selain perbaikan dan

penyempurnaan diadakan juga kegiatan konsolidasi, yaitu penarikan kesimpulan tentang hal-hal yang lebih bersifat umum yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas. Hal itu dilakukan, sebab meskipun suatu unit eksperimen telah cukup valid dan praktis pada suatu sekolah, belum tentu demikian juga pada sekolah yang lainnya. Untuk menguji pemberlakuannya pada daerah yang lebih luas perlu adanya kegiatan konsolidasi.

Langkah keempat, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Apabila dalam kegiatan penyempurnaan dan konsolidasi telah diperoleh sifatnya yang lebih menyeluruh atau berlaku lebih luas, hal itu masih harus dikaji oleh para ahli kurikulum dan para profesional kurikulum lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui konsep-konsep dasar atau landasan-landasan teori yang dipakai sudah masuk dan dipakai.

Langkah kelima, implementasi dan diseminasi, yaitu menerapkan kurikulum baru ini pada daerah atau sekolah-sekolah yang lebih luas. Di dalam langkah ini masalah dan kesulitan-kesulitan pelaksanaan tetap dihadapi, baik berkenaan dengan kesiapan guru-guru, fasilitas, alat dan bahan, juga biaya.

Dari langkah-langkah di atas menunjukkan uraian yang jelas tentang pendapat Taba yang mempunyai ciri-ciri sistematis dan pendekatan yang logis terhadap pengembangan kurikulum. Taba secara tegas menempatkan kerasionalan atau tujuan dari kurikulum dalam rangkaian model kurikulum, meskipun dalam hal ini Taba lebih luas daripada Tyler. Pendekatannya lebih menitikberatkan pada anak didik, yang muncul dari

interaksinya dengan sekolah-sekolah di California. Selama bekerja dengan para pendidik, Taba menyadari bahwa mereka akan menjadi para pengembang kurikulum yang penting di masa mendatang dan suatu sistem model yang rasional akan berarti bagi mereka. Model kurikulum Tyler dan Taba dikategorikan ke dalam Rational Model atau Objectivis Model. 177

d. Model Pengembangan Kurikulum Rogers

Menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan (becoming developing changing), sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Pendidikan juga tidak lain merupakan upaya untuk membantu memperlancar dan mempercepat perubahan tersebut. Guru serta pendidik lainnya bukan memberi informasi apalagi penentu perkembangan anak, mereka hanyalah pendorong dan pemerlancar perkembangan anak. 178

Menurut Rogers kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Langkahlangkahnya sebagai berikut: 179

1) Diadakannya kelompok untuk dapatnya hubungan interpersonal di tempat yang tidak sibuk

Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum...*, 159.
 Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, 167.

¹⁷⁹ H. Dakir, Perencanaan dan Pengembangan..., 98.

Di dalam penentuan target ini satu-satunya kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Selama satu minggu para pejabat pendidikan/administrator melakukan kegiatan kelompok dalam suasana yang rileks, tidak formal.

 Kurang lebih dalam satu minggu para peserta mengadakan saling bertukar pengalaman, di bawah pimpinan staf pengajar

Sama seperti yang dilakukan para pejabat pendidikan, guru juga turut serta dalam kegiatan kelompok. Keikutsertaan guru dalam kelompok tersebut sebaiknya bersifat sukarela, lama kegiatan kalau mungkin satu minggu lebih baik, tetapi dapat juga kurang dari satu minggu.

3) Kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam satu sekolah, sehingga hubungan interpersonal akan menjadi lebih sempurna, yaitu hubungan antara guru dengan guru, guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik dalam suasana yang akrab.

Langkah ketiga ini dalam rangka pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau satu unit pelajaran. Selama lima hari penuh siswa ikut serta dalam kegiatan kelompok, dengan fasilitator para guru atau administrator atau fasilitator dari luar.

4) Selanjutnya pertemuan diadakan dengan mengikutsertakan anggota yang lebih luas lagi, yaitu dengan mengikutsertakan para pegawai administrasi dengan orang tua peserta didik. Dalam situasi yang

demikian diharapkan masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab, sehingga memudahkan berbagai pemecahan problem sekolah yang dihadapi.

Dalam langkah keempat ini partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Kegiatan ini dapat dikoordinasi oleh komite sekolah di masing-masing sekolah. Lama kegiatan kelompok dapat dilakukan tiga jam setiap sore selama satu minggu atau 24 jam secara terusmenerus. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya orang-orang dalam hubungannya dengan sesama orang tua, dengan anak, dan dengan guru. Rogers juga menyarankan, kalau mungkin ada pengalaman kegiatan kelompok yang bersifat campuran. Kegiatan merupakan kulminasi dari semua kegiatan kelompok di atas.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyusunan kurikulum akan lebih realistis, karena didasari oleh kenyataan yang ada di masyarakat dan merupakan masukan dari berbagai pihak.

Model yang dikemukakan oleh Rogers terutama akan berguna bagi para pengajar di sekolah atau di perguruan tinggi. Ada beberapa model yang dikemukakan Rogers, yaitu jumlah dari model yang paling sederhana sampai dengan yang berikutnya, sebenarnya merupakan penyempurnaan dari model-model sebelumnya. Adapun model-model tersebut (ada empat model) dapat dikemukakan sebagai berikut: 180

_

¹⁸⁰ A. Hamid Syarif, *Pengembangan Kurikulum* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 97.

1) Model I

Model ini sebagai model yang paling sederhana. Model ini menjelaskan bahwa pendidikan hanyalah meliputi informasi dan ujian. Model ini banyak digunakan oleh para tenaga pengajar, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Asumsi yang mendasari pemikiran model ini adalah:

- a) Evaluasi adalah pendidikan dan pendidikan adalah evaluasi.
- b) Pengetahuan merupakan akumulasi bagian-bagian dari materi dan informasi.

Kedua asumsi di atas dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.3 Alur Penyusunan Kurikulum Model I

Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang umum dan bersifat tradisional, walaupun model ini tidak memadai, tetapi setidaknya telah memberikan pertanyaan pokok yaitu:

- a) Mengapa saya mengajarkan mata pelajaran itu?
- b) Bagaimana saya mengetahui keberhasilan dalam mengajar mata pelajaran itu?

Pertanyaan pertama berhubungan dengan isi mata pelajaran, dan pertanyaan kedua secara tidak langsung berkaitan dengan ujian/ evaluasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya dipertimbangkan validitas dan signifikansi terhadap apa yang diajarkan, kebutuhan atas keseimbangan di antara luas dan kedalaman pelajaran serta relevansinya

yang berujung pada minat siswa terhadap isi/materi pelajaran.

Model I ini mengabaikan metode mengajar yang memungkinkan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara bermakna. Urutan materi pelajaran, komulatif, dan hakikat hirarkhi. Dari beberapa pengetahuan dan pengenalan terhadap hubungan antara konsepkonsep harus dipertimbangkan juga. Aspek-aspek penting ini tidak akan diabaikan jika pertanyaan berikut ini dimunculkan:

- a) Mengapa saya mengajarkan materi ini dengan cara atau metode tertentu?
- b) Bagaimana saya mengorganisasi isi atau materi pelajaran ini?

Sehingga dengan belum munculnya kedua pertanyaan di atas menyebabkan model kedua dari Rogers muncul sebagai perbaikan dari model yang pertama

2) Model II

Model II ini dilakukan dengan menyempurnakan model I dengan menambahkan kedua jawaban pada pertanyaan (3 dan 4) tersebut, yaitu tentang metode dan organisasi bahan pelajaran.

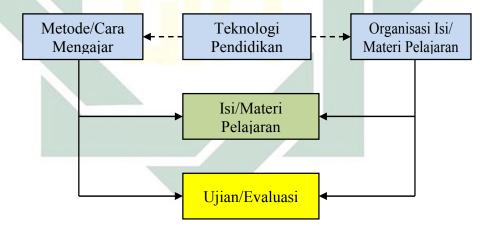
Dalam pengembangan kurikulum pada model II di atas, sudah dipikirkan pemilihan metode yang efektif bagi berlangsungnya proses pengajaran. Di samping itu, bahan pelajaran juga sudah disusun secara sistematis, dari yang mudah ke yang lebih sukar dan juga memperhatikan luas dan dalamnya suatu bahan pelajaran. Akan tetapi, model II belum memperhatikan masalah teknologi pendidikan yang sangat menunjang

keberhasilan kegiatan pengajaran. Teknologi pendidikan yang dimaksud adalah berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan:

- a) Buku-buku pelajaran apakah yang harus dipergunakan dalam suatu mata pelajaran?
- b) Alat atau media pengajaran apa yang dapat dipergunakan dalam mata pelajaran tertentu?

3) Model III

Dengan masih munculnya kedua pertanyaan di atas, maka muncul lagi model pengembangan kurikulum model III sebagaimana bagan di bawah ini, walaupun masih memerlukan pengembangan yang lebih lanjut.



Gambar 2.4 Alur Penyusunan Kurikulum Model II

Model III pengembangan kurikulum ini merupakan penyempurnaan model II yang belum dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan 5 dan 6, yaitu dengan memasukkan unsur teknologi pendidikan ke dalamnya.

Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada bahan pelajaran hanya akan sampai pada model III. Padahal masih ada satu

lagi masalah pokok yang harus diperhatikan, yaitu yang berkaitan dengan masalah tujuan. 181

4) Model IV

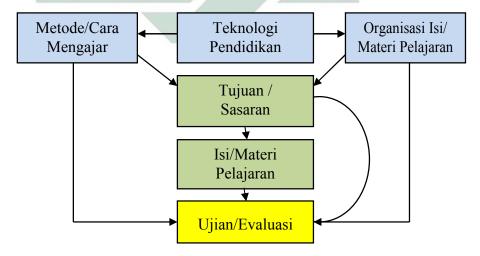
Model IV merupakan penyempurnaan model III, yaitu dengan memasukkan tujuan ke dalamnya. Tujuan itulah yang bersifat mengikat semua komponen yang lain, baik metode, organisasi bahan, teknologi pengajaran, isi pelajaran maupun kegiatan penilaian yang dilakukan.

Model III dari Rogers ini masih menyisakan satu pertanyaan pokok untuk mengembangkan kurikulum yang lebih sempurna.

Adapun pertanyaan itu adalah:

Apa yang saya harapkan dari siswa yang harus mereka lakukan sebagai hasil pengajaran saya ini?

Pertanyaan di atas merupakan suatu pertanyaan yang mendukung pada model pengembangan kurikulum yang lebih sempurna, yaitu model IV dengan komponen sebagai berikut.



Gambar 2.5 Alur Penyusunan Kurikulum Model IV

¹⁸¹ HM. Ahmad dkk, *Pengembangan Kurikulum...*, 53.

Model IV merupakan model pengembangan kurikulum yang sempurna, sebab tujuan atau sasaran pada model ini sebagai bagian dari salah satu komponennya. Tujuan ini sebenarnya akan membantu jawaban-jawaban terhadap semua pertanyaan. Tujuan atau sasaran harus menempati suatu posisi sentral dalam setiap model pengembangan kurikulum.

Model pengembangan kurikulum ini menunjukkan bahwa pengajaran, isi atau materi pelajaran dan organisasi materinya serta evaluasi atau ujian, semua terkait pada tujuan-tujuan yang telah diformulasikan secara jelas.

e. Model Pengembangan Kurikulum Ralp Tyler

Dalam bukunya yang berjudul *Basic Principle Curriculum and Inductions*, Tyler mengatakan bahwa *curriculum development needed to be treated logically and systematically*. Ia berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajaran dari suatu lembaga pendidikan.¹⁸²

Lebih lanjut Tyler mengungkapkan bahwa untuk mengembangkan suatu kurikulum perlu menempatkan empat pertanyaan berikut:

- 1) What educational purposes should the school seek to attain? (objectives)
- 2) What educational experiences are likely to attain these objectives? (instructional strategic and content)
- 3) How can these educational experiences be organized effectively?

 (organizing learning experiences)

¹⁸² Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum...*, 154.

4) How can we determine whether these purposes are being attains?

(assessment and evaluation)

Sebagai bapak (*father*) dari pada pengembang kurikulum (*curriculum development*), Tyler telah menanamkan perlunya hal lebih rasional, sistematis, dan pendekatan yang berarti dalam tugas mereka. Tetapi, karya Tyler atau pendapat Tyler sering dipandang rendah oleh beberapa penulis sesudahnya. Hal itu karena dalam hal menentukan *objectives model*, ia terkesan sangat kaku. Namun sebenarnya pandangan yang demikian tidak selalu benar, mengingat banyak karya atau tulisan Tyler yang telah salah diinterpretasi, dianalisis secara dangkal, dan bahkan cenderung menghindarinya.

Tentu saja Tyler memiliki pengaruh yang kuat dan luas terhadap para pengembang kurikulum atau penulis kurikulum lainnya selama tiga dekade yang lalu. Secara jelas tentang model pengembangan kurikulum dapat dilihat pada gambar berikut.¹⁸³

Objectives	What educational purposes should the school seek to attain?
\	
Selecting Learningn	What educational experiences are likely to
Experiences	attain these objectives?
Organizing Learning	How can these educational experiences be
Experiences	organized effectively?
\downarrow	
Evaluation	How can we determine whether these
	purposes are being attains?)

Gambar 2.6 Model Pengembangan Kurikulum

¹⁸³ Ibid, 156

f. Model Pengembangan Kurikulum Sistem Beu'camp

Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Beu'camp seorang ahli kurikulum. Beu'camp mengemukakan lima hal di dalam suatu pengembangan kurikulum: 184

Pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, apakah suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, propinsi, atapun seluruh daerah. Pentahapan arena ini ditentukan oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijaksanaan dalam pengembangan kurikulum, serta oleh tujuan pengembangan kurikulum. Walaupun daerah yang menjadi wewenang kepala kanwil pendidikan dan kebudayaan mencakup suatu wilayah propinsi, tetapi arena pengembangan kurikulum hanya mencakup satu daerah kabupaten saja sebagai pilot proyek.

Kedua, menetapkan personalia, yaitu menetapkan siapa-siapa saja yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ada empat kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

- Para ahli pendidikan/kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar.
- 2) Para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru terpilih.
- 3) Para profesional dalam sistem pendidikan.
- 4) Profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat.

¹⁸⁴ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, 163.

Ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar serta kegiatan evaluasi dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Beu'camp membagi keseluruhan kegiatan ini dalam lima langkah, yaitu:

- 1) Membentuk tim pengembang kurikulum.
- Mengadakan penilaian atau penelitian terhadap kurikulum yang ada yang sedang digunakan.
- 3) Studi penjajakan tentang kemungkinan penyusunan kurikulum baru.
- 4) Merumuskan kriteria-kriteria bagi penentuan kurikulum baru.
- 5) Penulisan dan p<mark>eny</mark>usunan kurikulum baru.

Keempat, implementasi kurikulum. Langkah ini merupakan langkah menerapkan atau melaksanakan kurikulum yang bukan sesuatu yang sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh baik kesiapan guru-guru, siswa, fasilitas, bahan maupun biaya, di samping kesiapan manajerial dari pimpinan sekolah atau administrator setempat.

Kelima, langkah ini merupakan langkah terakhir yaitu mengevaluasi kurikulum. Dalam langkah ini mencakup empat hal, yaitu:

- 2) Evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru.
- 3) Evaluasi desain kurikulum
- 4) Evaluasi belajar siswa

5) Evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum, data yang diperoleh dari hasil evaluasi ini digunakan bagi penyempurnaan sistem dan desain kurikulum serta prinsip-prinsip pelaksanaannya.

9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kurikulum

Dalam kegiatan pengembangan kurikulum ini tentunya suatu lembaga pendidikan agar perkembangan pendidikan itu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman. Oleh sebab itu sekolah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kekuatan yang berada di masyarakat terutama dari perguruan tinggi, masyarakat dan lain-lain.

Berikut ini akan kami paparkan beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum di sekolah.

a. Perguruan Tinggi

Kurikulum minimal mendapat dua pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di Perguruan Tinggi Keguruan (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). ¹⁸⁵

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan pemikiran baik landasan dan konsep (teori) maupun landasan secara praktis bagi isi kurikulum dan pengembangannya. Beberapa ilmu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan

¹⁸⁵ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum*..., 158.

dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan.

Kurikulum perguruan tinggi keguruan sangat mempengaruhi kompetensi guru yang dihasilkannya. Kompetensi guru ini akan mempengaruhi pelaksanaan pengembangan kurikulum di sekolah. ¹⁸⁶

Penguasaan ilmu, baik ilmu pendidikan maupun bidang studi serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Guru-guru yang mengajar pada berbagai jenjang dan jenis sekolah yang ada dewasa ini umumnya disiapkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan.¹⁸⁷

b. Masyarakat

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat. Sebagai bagian dan agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dimana sekolah itu berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. ¹⁸⁸

Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat homogen atau heterogen, masyarakat kota atau desa, petani, pedagang, pegawai, dan sebagainya. Sekolah harus melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di

٠

¹⁸⁶ Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum..., 106.

¹⁸⁷ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, 159.

¹⁸⁸ Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum..., 106.

masyarakat mempengaruhi pengembangan kurikulum, sebagai sekolah bukan hanya mempersiapkan anak untuk hidup, tetapi juga untuk bekerja dan berusaha. Jenis pekerjaan dan perusahaan yang ada di masyarakat menuntut persiapannya di sekolah.¹⁸⁹

c. Sistem Nilai

Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, nilai sosial maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan penerusan nilai-nilai yang berkembang. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasi dalam kurikulum. 190

Masalah utama yang dihadapi pengembang kurikulum dalam menghadapi nilai ini adalah bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen dan multifaset. Masyarakat memiliki kelompok-kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, spiritual dan sebagainya yang tiap kelompok sering memiliki nilai yang berbeda. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda.

Ada beberapa hal yang hrus diperhatikan guru dalam mengajarkan nilai:

_

¹⁸⁹ Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, 159.

¹⁹⁰ Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum...*, 106.

- Guru hendaknya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat;
- 2) Guru hendaknya berpegang pada prinsip demokrasi, etis, dan moral;
- 3) Guru berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru;
- 4) Guru menghargai nilai-nilai kelompok lain;
- 5) Guru memahami dan menerima keragaman kebudayaan sendiri. 191

Bahwa terhadap pengembangan kurikulum terdapat kekuatan-kekuatan dari luar yang mempengaruhinya, hendaknya diterima sebagai sesuatu yang wajar, sebab pendidikan itu tidak berlangsung dalam suatu vakum, melainkan di dalam dan untuk suatu masyarakat tertentu. Bahkan sebaliknya bila pendidikan/pembinaan kurikulum menjadikannya sebagai suatu menara gedung yang terpisah dari dunia luar, dapatlah dipertanyakan: untuk apa kurikulum yang sedang dibinanya itu? Jadi para pembina kurikulum hendaknya sadar akan realitas yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Bukan itu saja melainkan hendaknya menempatkan diri juga dalam masyarakat yang diinginkan.

10. Faktor-Faktor yang Menghambat Pengembangan Kurikulum

Segala macam kegiatan/organisasi apapun pasti ada tantangan dan hambatan yang selalu menyertai kegiatan itu, baik itu berupa tantangan dan hambatan yang ringan maupun yang berat. Sekalipun kecil dan ringannya hambatan itu apabila kita menganggap enteng dan remeh tanpa ada solusi yang logis untuk mengatasinya akan menjadi besar dan berat.

¹⁹¹ Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum*..., 160.

Akhirnya kegiatan tersebut dapat menjadi gagal dan tidak mendapatkan keuntungan (*unhappy ending*).

Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Hambatan pertama terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, kurang waktu. Selama ini banyak guru di samping berprofesi sebagai tenaga pengajar juga mempunyai pekerjaan sampingan di luar profesinya itu. Pekerjaan sampingan ini terpaksa dilakukan oleh seorang guru dengan alasan untuk memenuhi beban biaya kebutuhan hidup keluarganya, sehingga dengan profesi sampingannya ini seorang guru tidak punya banyak waktu untuk berpikir dan fokus terhadap profesinya sebagai tenaga pengajar yang seharusnya seorang guru memfokuskan terhadap materi pengajaran dan mengolah kurikulum serta mengembangkannya.

Diharapkan dengan adanya program pemerintah yang dikemas dengan sertifikasi guru dan disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru, kebutuhan keluarga seorang guru dapat terpenuhi dan berkonsentrasi terhadap profesinya sebagai tenaga pendidik. Dengan kata lain, tidak ada seorang guru pun yang melakukan pekerjaan sampingan lagi.

Kedua, kekurangsesuaian pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Perbedaan pengalaman dan disiplin ilmu yang mereka tekuni menyebabkan terjadinya beda pendapat sehingga bila perbedaan ini tidak dapat disatukan/dipertemukan, sulit bagi suatu lembaga untuk melakukan pengembangan kurikulum.

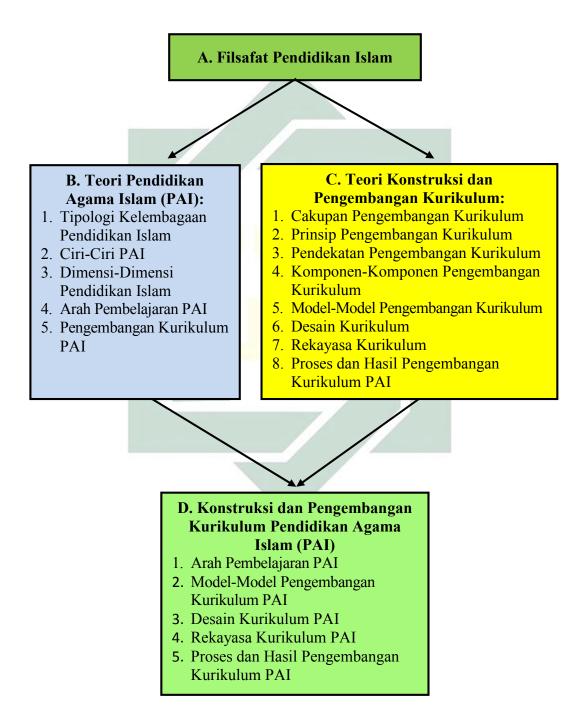
Ketiga, karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Kemampuan keilmuan dari masing-masing guru, kepala sekolah, administrator berbeda dan terbatas. Sumber daya manusia di suatu lembaga menjadi faktor utama dalam kemajuan lembaga tersebut. Jika SDM-nya rendah sulit bagi lembaga tersebut untuk maju dan mengembangkan lembaganya. Salah satu faktor yang menghambat pengembangan kurikulum adalah keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini terjadi pada saat pemerintah memberikan wewenang kepada semua lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan lingkungannya yang banyak terjadi adalah ketidakmampuan SDM-nya.

Hambatan lain datang dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat adalah sumber input dari sekolah. Keberhasilan pendidikan, ketetapan kurikulum yang digunakan membutuhkan bantuan, serta input fakta dan pemikiran dari masyarakat. Jika suatu lembaga tidak tanggap dan kurang memberdayakan masyarakat maka lembaga tersebut bersiap-siaplah untuk gulung tikar, dalam artian akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Hambatan lain yang dihadapi oleh pengembang kurikulum adalah masalah biaya. Untuk pengembangan kurikulum, apalagi yang berbentuk kegiatan eksperimen, baik metode, isi, atau sistem secara keseluruhan

¹⁹² Ibid, 161.

membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit. Harapan dari pengelola pendidikan dengan terealisasinya anggaran pendidikan 20% kebutuhan pembiayaan pendidikan dapat terpenuhi dengan baik.



Gambar 2.7 Alur Theoretical Framework